



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) PT. HOLCIM TBK.
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR
(STUDI KASUS PADA BMT SWADAYA PRIBUMI)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.) pada Program Studi Magister Perencanaan
dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**

**IRAWAN SUSANTO
NPM. 080 643 0140**

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN : EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Irawan Susanto

NPM : 080 643 0140

Tandatangan : 

Tanggal : Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Irawan Susanto
NPM : 080 643 0140
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)
PT. Holcim Tbk., terhadap Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor (Studi kasus pada BMT Swadaya
Pribumi)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Vivi Yulaswati


(.....)

Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis


(.....)

Penguji : Darlis Rabai, SE., MA


(.....)

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal :

" Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami) mereka menyunjungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri"

QS- As Sajdah - 15



Kupersembahkan Karya Kecilku Untuk:

- * Keempat Orang Tuaku,***
- * Istriku Tercinta "Nia Sentut Adhipratiwy" serta***
- * Kakak-Kakak dan Adikku Terkasih***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulisan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Holcim Tbk. terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada BMT Swadaya Pribumi)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir jaman. Tesis ini disusun sebagai prasyarat untuk mencapai derajat kesarjanaan S-2 pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih tersebut terutama disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Vivi Yulaswati selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta kesabarannya dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya penulisan tesis ini;
2. Bapak Dr. Arindra Zainal, Phd., selaku Ketua Pengelola Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia;
3. Bapak Dr. Andi Fami dan Bapak Darlis Rabai, SE., MA selaku dosen penguji
4. Bapak Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor atas izin tugas belajar yang telah diberikan;
5. Seluruh dosen mata kuliah pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik yang telah ikhlas dalam membagi dan menyumbangkan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis;
6. Rekan-rekan di Bagian Akademik dan Perpustakaan pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia yang telah membantu penyelenggaraan perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini;
7. Istriku tersayang Nia “teu teu “ Sentut., terimakasih atas diskusi, dorongan semangat, dan kesabaran yang telah diberikan. Dikau adalah penyemangat dan darah serta cahaya buat kehidupanku.

8. Kedua orang tuaku tersayang dan mertuaku, serta saudara-saudaraku yang dengan penuh ikhlas, kasih dan sayangnya telah mengiringi perjalanan studi penulis dengan doa dan motivasi;
9. Semua rekan-rekan angkatan Bappenas XIX, atas kebersamaannya, pa Andri, pa Anton, Desire, Bu Desi, Bu Illa, pa Sofyan, Bu Ivon, Bu Diah, Dian, Bu Rubi, Bu Nova, pa Roni, pa Firman, pa Nata, pa Legi, pa Sidik, pa Elyis, pa Junenti dan bu Irma terima kasih atas diskusinya dan segala masukan yang diberikan dalam penulisan tesis ini.
10. Pa Dharmawan, pa Suyatno, Pa Ari di PT. Holcim, Pa Eman di BMT Swadaya Pribumi, Pa Sekcam Klapanunggal serta seluruh Sekdes se-Kecamatan Klapanunggal yang menjadi objek penelitian, terima kasih atas informasi dan kerjasamanya;
11. Segenap unsur pimpinan dan rekan-rekan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor, terima kasih atas segala informasi, masukan, dan segenap bantuan yang telah diberikan baik selama menempuh studi, maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan baik dari sisi bobot dan isi maupun dari sistematika penulisan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Salemba, Januari 2010

Penulis

Irawan Susanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

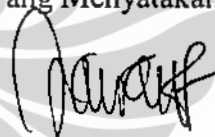
Nama : Irawan Susanto
NPM : 080 643 0140
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Holcim Tbk., terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada BMT Swadaya Pribumi) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat ,dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Salemba
Pada Tanggal :
Yang Menyatakan



(Irawan Susanto)

ABSTRAK

Nama : Irawan Susanto
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Holcim Tbk. terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (Studi kasus pada BMT Swadaya Pribumi)

Peran swasta sebagai salah satu stakeholder pembangunan sering dipertanyakan banyak orang. Padahal tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjaga relasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Disamping menjaga relasi, tanggung jawab sosial perusahaan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan aktivitas perusahaan, sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana saat ini menjadi tujuan setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR. Salah satu peran yang sering dilakukan perusahaan misalnya dengan pemberdayaan masyarakat dimana harapannya adalah masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi, kreatif, dan mempunyai rasa percaya diri sehingga tingkat kemiskinan diharapkan dapat berkurang. Melalui BMT Swadaya Pribumi, PT. Holcim melaksanakan kegiatan CSR bidang pemberdayaan masyarakat di kecamatan Klapanunggal-Kabupaten Bogor. Namun dugaan awal penelitian ternyata masih terdapat kendala dalam hal pemberdayaan tersebut sehingga hasilnya tidak efektif.

Tesis ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi. Alat Analisis yang digunakan yaitu AHP dengan menggunakan lima responden ahli. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat menjadi faktor utama dan dipengaruhi oleh pelibatan masyarakat dengan bobot tertinggi. Dalam kriteria kelembagaan BMT (Holcim), kendala tertinggi adalah dukungan dana serta yang ketiga adalah faktor fasilitasi pemerintah dengan dukungan permodalan menjadi masalah utama.

Kata kunci : CSR, Pemberdayaan Masyarakat, BMT Swadaya Pribumi, AHP

ABSTRACT

Name : Irawan Susanto
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : The Corporate Social Responsibility Implementation (CSR) PT. Holcim Tbk., Towards Empowerment of the Community in the Subdistrict of Klapanunggal-District Bogor (A Case Study on BMT Swadaya Pribumi)

Private role as one of the stakeholders of development are often questionable by many people. Yet corporate social responsibility is a basic obligation that must be fulfilled by companies in maintaining the relationship between the company and its stakeholders. In addition to maintaining relationships, corporate social responsibility also plays a role in maintaining the sustainability of the company's activities, in line with the concept of sustainable development which is now a goal by every company that runs the CSR activities. One role that is often done by companies such as community empowerment is a community where hope can be more economically independent, creative, and have confidence that the poverty rate is expected to decrease. Through BMT Swadaya Pribumi, activities of PT. Holcim's CSR in the field of community development sub-district Klapanunggal-District Bogor. But the initial allegations of research there is still constraints in terms of empowerment so that the result is not effective. This thesis examined the factors that become an obstacle in community empowerment through BMT Swadaya Pribumi. Analysis tool that is used AHP by using five expert respondents. This research is qualitative research with a descriptive design. The results showed that the condition of society becomes the main factor and influenced by the involvement of communities with the highest weight. In the institutional criteria for BMT (Holcim), the highest obstacle is financial support and the third is the factor with the support of government facilitation of capital into major problems.

The keyword: CSR, Empowerment of the Community, BMT Swadaya Pribumi, AHP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Metodologi Penelitian	10
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.4.2 Validitas Data	11
1.4.3 Peralatan Penelitian	11
1.4.4 Kerangka Pikir Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
2. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	15
2.1 Kemiskinan	15
2.2 Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	17
2.3 Corporate Social Responsibility	18
2.3.1 Pengertian	18
2.3.2 Program Corporate Social Responsibility	20
2.3.3 Dasar Hukum CSR	20
2.3.4 Dimensi dan Indikator Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	21
2.4 Pendapat tentang CSR	23
2.5 Pemberdayaan Masyarakat	24
2.5.1 Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat	24
2.5.2 Karakteristik, Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat	26
2.6 Peran Pemerintah melalui Program Gerakan Masyarakat Mandiri	29
2.7 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	32
2.8 Kajian Penelitian Terdahulu	34

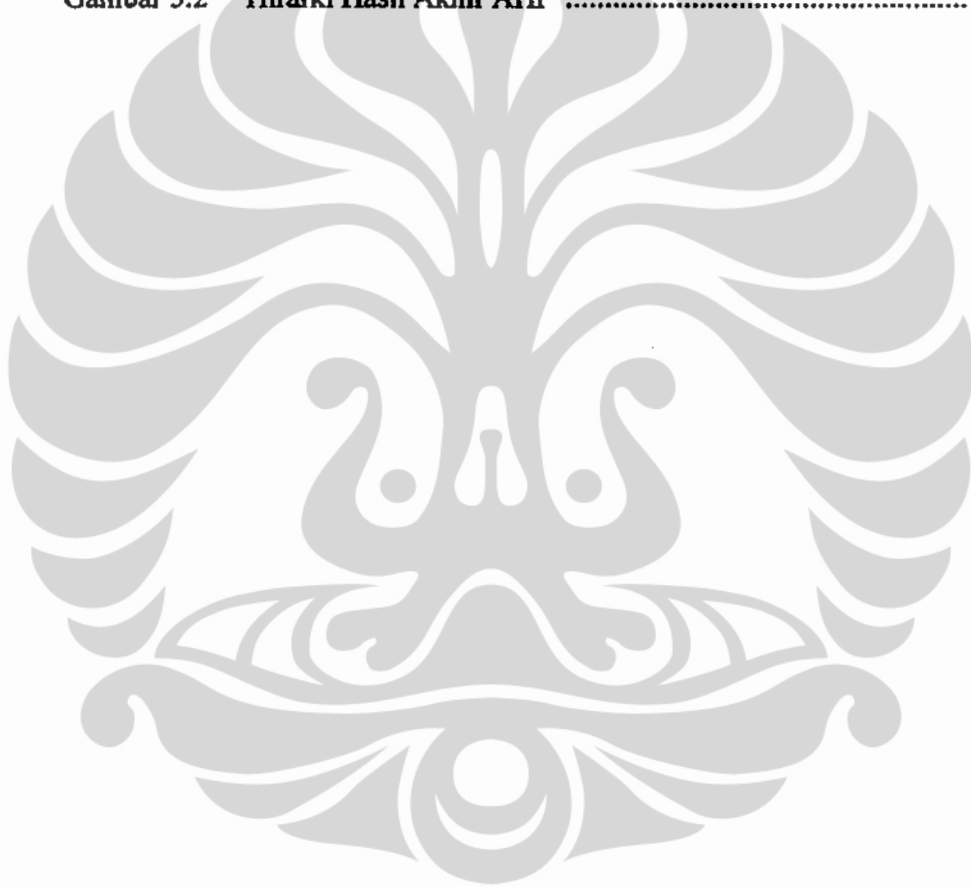
3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL TEMUAN LAPANGAN	36
3.1 Profil Kecamatan Klapanunggal	36
3.1.1 Kondisi Geografis	36
3.1.2 Pemerintahan	36
3.1.3 Kondisi Demografi	37
3.1.4 Kondisi Penduduk Miskin	38
3.2 Gambaran Hasil Temuan Lapangan	38
3.2.1 Pelaksanaan Corporate Social Responsibility	38
3.2.2 Program-Program CSR PT. Holcim	42
3.2.3 Perkembangan Dana GMM pada BMT Swadaya Pribumi.....	48
3.2.3 Peran Pemerintah Daerah	49
4. METODOLOGI PENELITIAN	52
4.1 Analytical Hierarchy Process	52
4.1.1 Tahapan-Tahapan dalam Metode AHP.....	53
4.1.2 Penyusunan Hirarki	55
4.1.3 Penjelasan Kriteria dan Sub Kriteria dalam Hirarki	58
4.1.4 Kelebihan dan Kelemahan Metode AHP.....	60
4.2 Deskripsi Responden	62
4.3 Jenis dan Sumber Data	63
4.4 Validitas Data	64
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Masalah Utama dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal	66
5.2 Gambaran Persepsi Responden	73
5.3 Deskripsi Indikator Pelaksanaan Community Relations	76
5.3.1 Dimensi Variabel untuk Akuntabilitas dan Transparansi ..	76
5.3.2 Dimensi Variabel untuk Pelibatan Masyarakat	77
6. KESIMPULAN DAN SARAN	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran dan Implikasi Kebijakan	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	3
Tabel 1.2	Perkembangan Nasabah dan Aset BMT Swadaya Pribumi Tahun 2006 – 2008	9
Tabel 2.2	Pendapat Pro dan Kontra tentang Penerapan CSR	23
Tabel 2.3	Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kriterianya	33
Tabel 3.1	Komposisi Penduduk Kecamatan Klapanunggal Menurut Umur	37
Tabel 3.2	Komposisi Penduduk Kecamatan Klapanunggal Menurut Mata Pencaharian	38
Tabel 3.3	Uraian Tugas Pokok pengelola ComRel	40
Tabel 3.4	Perkembangan Nasabah dan Aset BMT Swadaya Pribumi Tahun 2006 – 2008	45
Tabel 3.5	Perbandingan antara nasabah BMT penduduk Klapanunggal dengan total nasabah	46
Tabel 3.6	Perkembangan Nasabah BMT Pribumi dari Dana GMM	49
Tabel 3.7	Alokasi Dana Perguliran Masyarakat dari APBD Kabupaten ..	50
Tabel 4.1	Nilai Skala Perbandingan Berpasangan	54
Tabel 5.1	Hasil Sintesa Lokal Kriteria dan Sub Kriteria terhadap Identifikasi masalah Utama Pemberdayaan Masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal	66
Tabel 5.2	Hasil Sintesa Sub Kriteria terhadap Identifikasi Masalah Utama Pemberdayaan Masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal	67
Tabel 5.3	Kegiatan Badan dan Dins Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Mediator pemandirian dalam Program GMM	72
Tabel 5.4	Hasil Akhir AHP dengan Lima Ekspert	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Dana CSR PT. Holcim Tbk tahun 2002 - 2008	7
Gambar 1.2	Kerangka Pikir Penelitian	14
Gambar 2.1	Model Perguliran pada Lembaga keuangan Mikro	31
Gambar 3.1	Struktur Organisasi BMT	44
Gambar 4.1	Kriteria-kriteria dalam mencapai tujuan Penelitian.....	56
Gambar 4.2	Sub Kriteria dalam Kelembagaan BMT (Holcim)	57
Gambar 4.3	Sub Kriteria dalam Kondisi Masyarakat	57
Gambar 4.4	Sub Kriteria dalam Fasilitas Pemerintahan Daerah	58
Gambar 5.1	Hirarki Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BMT Swadaya Pribumi	65
Gambar 5.2	Hirarki Hasil Akhir AHP	76



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Dana CSR PT. Holcim Tbk. tahun 2002-2008	8
--	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan swasta sebagai salah satu stakeholder pembangunan di Indonesia selama ini seringkali dipertanyakan banyak orang. Mereka sering dituding tidak memiliki kepekaan dan hanya mengutamakan pengumpulan profit semata-mata tanpa menghiraukan kondisi masyarakat sekitar tempat mereka menjalankan usahanya. Banyak perusahaan yang masih mengabaikan masyarakat sebagai salah satu stakeholdernya. Padahal tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam rangka menjaga relasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, termasuk yang ada di sekitar area perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas, bahwa korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya baik sengaja maupun tidak sengaja bagi para stakeholdernya (Dellaportas et.al,2005). Disamping menjaga relasi, tanggung jawab sosial perusahaan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan aktivitas perusahaan.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan sekarang menjadi tujuan yang ingin dicapai pada saat perusahaan memberikan bantuan pada masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mengandung dua ide utama yaitu; 1) untuk melindungi lingkungan dibutuhkan pembangunan ekonomi, karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan sehingga perlindungan terhadap lingkungan hidup memerlukan standar hidup masyarakat yang memadai di seluruh dunia dan; 2) Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan yaitu dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi di masa sekarang bagi generasi mendatang.

Perkembangan pemahaman tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dunia telah dimulai sejak tahun 1950 oleh Howard R. Bowen. Perjalanan konsep CSR selama hampir lima puluh tahun lebih tersebut telah banyak mengubah orientasi CSR. Jika pada awal perkembangannya konsep ini

lebih banyak dilandasi oleh kegiatan yang bersifat filantropi atau kedermawanan, maka sekarang kita melihat CSR lebih dijadikan sebagai strategi untuk meningkatkan citra perusahaan yang diharapkan akan mempengaruhi kinerjanya.

Dalam perkembangannya, konsep CSR sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep ini awalnya dicetuskan oleh International Union for Conservation of Nature & Natural Resources, melalui World Conservation Strategy (1980). Menurut WCS tersebut, "Pembangunan Berkelanjutan adalah integrasi antara konservasi dan pembangunan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan terhadap bumi akan tetap menjamin keberlangsungan dan taraf hidup layak bagi semua orang".¹ Konsep lain ditawarkan oleh Brundtland Commission, (1987), yaitu : *Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang)*.²

Sejalan dengan konsep sustainable development, maka konsep tentang CSR mengalami penyesuaian dan semakin berkembang dengan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan itu. Hal itu dapat terlihat dari definisi CSR yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebagai *bussiness's contribution to sustainable development and that corporate behavior must not only ensure returns to shareholders, wages to employees, and product and services to consumers, but they must respond to societal and environmental concern and values* (aktivitas perusahaan menyumbang terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan kinerjanya tidak hanya memastikan keuntungan bagi para pemegang saham, memberikan upah dan gaji bagi para karyawan, dan hasil berupa barang dan jasa kepada konsumen, tetapi perusahaan harus peduli terhadap masalah nilai-nilai masyarakat dan lingkungan).

¹ World Conservation Strategy 1980

² Brundtland Commission 1987

Sebagai akibat dari penerimaan konsep pembangunan berkelanjutan dalam CSR, maka dampak pelaksanaan CSR perusahaan harus mempunyai indikator-indikator yang berlaku standar di seluruh dunia. Indikator-indikator ini tercantum dalam laporan untuk mengukur kinerja pelaksanaan CSR yang disebut "laporan keberlanjutan" (*sustainability report*). Hal ini merupakan respon dan tindak lanjut dari penerimaan konsep pembangunan berkelanjutan. Laporan CSR atau laporan berkelanjutan pada hakekatnya memuat memuat tiga aspek pokok yaitu : ekonomi, lingkungan dan sosial. Pada tahun 1997 lahir lembaga yang membuat pedoman penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan yang memuat semacam indikator-indikator yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan dalam menilai kinerja pelaksanaan CSRnya. Lembaga ini dinamakan *Global Reporting Initiative* (GRI). Selain *Global Reporting Initiative* (GRI), ada lembaga lain yang juga membuat semacam indikator-indikator dalam CSR yang disebut *Business for Social Responsibility* (BfSR). Lembaga ini menyajikan sejumlah dimensi dan indikator CSR yang mencakup semua bidang, seperti pada tabel 1.1 dibawah ini yaitu :

Tabel 1.1 Indikator Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

No	INDIKATOR
1.	Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)
2.	Aturan Berbisnis (<i>Business of Conduct</i>)
3.	Keterlibatan Komunitas (<i>Community Involvement</i>)
4.	Tempat Kerja/Karyawan (<i>Workplace/employees</i>)
5.	Lingkungan (<i>Environment</i>)
6.	Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights</i>)
7.	<i>Corporate Governance</i>
8.	Pasar / Konsumen (<i>Marketplace/Consumer</i>)

Sumber : *Business for Social Responsibility* (2000)

Perkembangan kebijakan terkait CSR di Indonesia telah ada sejak tahun 2003, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya Undang-undang ini dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan

Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Peraturan lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 15 (b) dinyatakan bahwa “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Pemerintah mengambil inisiatif lain untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumberdaya alam dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana tercantum pada pasal 74 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.³ Pada pasal 74 ayat 1 tertulis bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penjelasannya adalah semua perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan kegiatan perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam artinya kegiatan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tetapi berdampak pada fungsi sumber daya alam.⁴ Sedangkan konsep pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup. Di dalamnya dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi depan.

Terbitnya UU No. 40 Tahun 2007 telah memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Kritik yang muncul, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah konsep di mana perusahaan, sesuai kemampuannya, melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Kegiatan itu ada di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam hukum formal, seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan, dan standar lingkungan. Menurut kelompok yang mengkritisi UU ini, jika diatur,

³ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability* (hal 165) ,2008, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

⁴ Ibid

selain bertentangan dengan prinsip kereleaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada perusahaan. Apalagi jika keharusan itu ditetapkan di Indonesia yang dikenal hukumnya tidak pasti dan pejabat publiknya korup.⁵ Kritik yang hampir senada juga menyebutkan bahwa kehendak regulasi itu punya potensi untuk memindahkan apa yang menjadi beban pemerintah ke pundak swasta, yang berarti privatisasi kewajiban sektor publik (Jalal, 2009). Ketika pemerintah gagal memenuhi kewajibannya, swasta ditunjuk untuk menanggung beban itu. Contoh nyata terkait hal ini adalah pada saat presiden SBY meminta agar perusahaan menyisihkan dana untuk pendidikan, padahal seharusnya pemerintahlah yang seharusnya menyediakan dana tersebut sesuai amanat APBN agar menyediakan dana 20% untuk sektor pendidikan.

Keberatan pihak swasta terhadap hal ini diperkuat oleh para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN), pada saat persidangan pengujian UU Nomor 40 tahun 2007 di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka menyatakan bahwa hal yang tidak fair bagi pengusaha yang sudah membayar pajak tetapi tetap dibebani oleh tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Mereka berpendapat bahwa hasil dari pajak yang mereka bayarkan ke pemerintah seharusnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan barang publik seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, beasiswa dan sebagainya.

Inti keberatan yang diajukan oleh KADIN sebenarnya bukan karena KADIN menolak penerapan CSR, buktinya KADIN cukup giat mempromosikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi salah satu pilar CSR, dimana salah satu prinsipnya adalah responsibilitas. Artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini relevan dengan teori altruism yang menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap orang dan firm mempunyai jiwa sosial, namun dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, altruism tersebut diinstitusikan, baik dalam bentuk konvensi, regulasi dan aturan lainnya (North:). Lebih jauh dijelaskan bahwa institusi

⁵ Meuthia Ganie-Rochman,, *Meregulasi Gagasan CSR*, artikel internet, diakses pada bulan Juli 2009

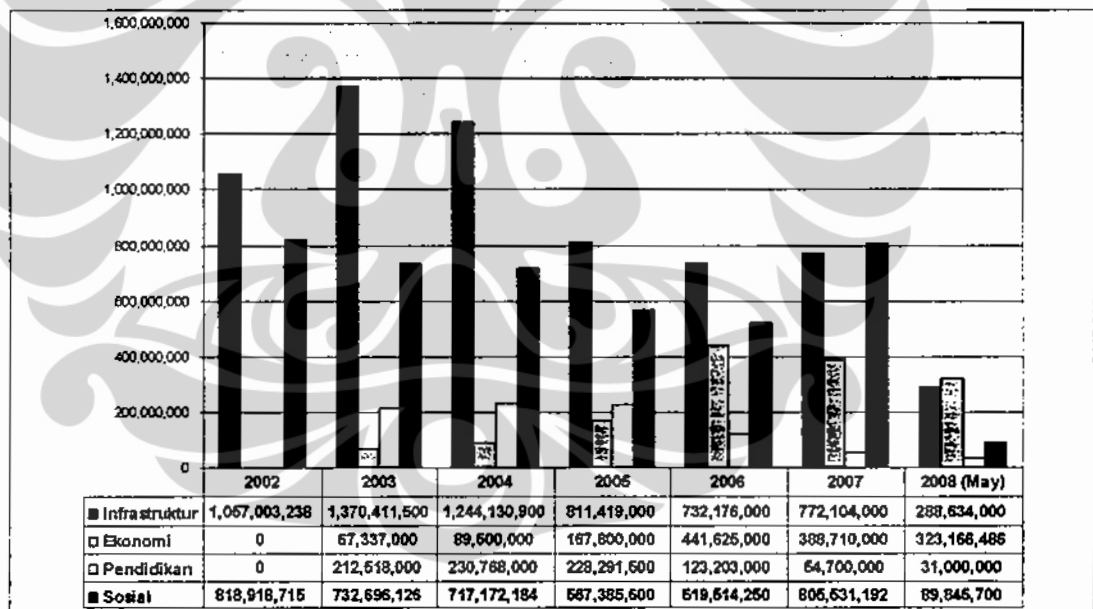
merupakan konteks (landasan) di mana organisasi bekerja: dia menyangkut aturan yang tampak (hukum) dan yang mengakar (norma).

Sementara itu, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa CSR juga banyak menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan pendekatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah menuangkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Di dalamnya dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi depan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan tidak dapat berdiri sendiri. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi sering disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan dukungan dari pembangunan sektor lainnya. Hal ini sering terjadi terutama pada saat pemerintah satu sisi memerlukan investor untuk menggerakkan pembangunan sekaligus menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat menikmati adanya peningkatan pendapatan. Namun di sisi lainnya investasi tersebut berdampak pada terganggunya lingkungan tempat investor tersebut melakukan kegiatannya. Misalnya adalah jenis usaha penambangan pasir dan pengambilan air minum. Jenis usaha ini sering mengakibatkan konflik dengan masyarakat setempat karena mengakibatkan keringnya sumber air di wilayah tersebut. Hal ini tidak akan terjadi jika pada saat investor mengajukan rencana kegiatan terlebih dahulu dilakukan tahapan seperti misalnya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dimana di dalamnya terdiri dari unsur pemerintah yang berhubungan dengan masalah lingkungan.

Keterkaitan berbagai konsep dan pendekatan pembangunan yang dijelaskan di atas dapat digambarkan oleh peran PT. Holcim Indonesia Tbk. yang sudah melaksanakan CSR bagi pengembangan masyarakat di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. PT. Holcim Indonesia Tbk., adalah salah satu perusahaan semen awalnya bernama PT Semen Cibinong, Tbk dan didirikan pada tahun 1971. Holcim Ltd., kemudian membeli sebagian sahamnya pada 13 Desember 2001. PT. Holcim Indonesia memiliki dua pabrik yaitu pabrik

Narogong, di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan pabrik Cilacap Jawa Tengah dengan kapasitas maksimum 7,9 juta ton per tahun. Per Juli 2008, kepemilikan saham Holcim Indonesia adalah Holcim Ltd (Swiss) sebesar 77,33% dan publik sebesar 22,7%. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan program tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan CSR terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Perusahaan semen lainnya yang beroperasi di Kabupaten Bogor adalah PT. Indocement Tungal Prakarsa yang berlokasi di kecamatan Citeureup.

Pelaksanaan CSR perusahaan ini sejak tahun 2002 telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 12,8 M; dibagi dalam 4 bidang, yaitu : Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang serius dalam menjalankan program CSR-nya. Jumlah dana yang telah dikeluarkan dapat menjadi salah satu indikatornya, seperti pada gambar 1.1 dibawah ini.



Sumber : Bahan Presentasi Community Relations Department tahun 2008

Gambar 1.1 Dana CSR PT. Holcim Tbk tahun 2002 - 2008

PT. Holcim berkomitmen melaksanakan program comrel yang menganut prinsip *sustainable development*, yang menempatkan masyarakat, konsumen dan lingkungan hidup sebagai kesatuan yang saling menunjang kinerja perusahaan, dimana perusahaan berkomitmen menempatkan masyarakat sebagai salah satu

pemangku kepentingannya (stake holder) yang nantinya diharapkan dapat berjalan mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap perusahaan. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan mewajibkannya untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup perusahaannya sendiri, dengan cara menjamin dan memelihara dan juga kelangsungan hidup dari seluruh stakeholdernya, termasuk masyarakat sekitarnya, konsumen maupun lingkungan hidup yang memberikan sumber daya alam bagi kelangsungan dan kesinambungan perusahaan.

Selain itu, pelaksanaan dan penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai strategi perusahaan, akan dapat memberikan keunggulan yang secara kompetitif mampu mempertahankan kinerja diatas perusahaan sejenis lainnya, serta memperoleh keuntungan dan profit sebagai akibat kepercayaan dan loyalitas masyarakat. Pemikiran ini didukung oleh Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mahon dan Griffin serta penelitian yang dilakukan oleh Roman, Hayibor dan Angle (Baron, 2006: 669) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan.⁶

Kusnaka (2004:8) berpendapat bahwa di dalam prinsip pembangunan yang berpusat pada masyarakat menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan, sehingga masyarakat semakin memperoleh peluang dan dorongan untuk menunjukkan inisiatif dan kreatifitas dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya. Sejalan dengan pemikiran Kusnaka tersebut, maka penulis mencoba meneliti bantuan yang dikeluarkan oleh PT. Holcim sejak tahun 2002, untuk membantu masyarakat di sekitar perusahaan. Namun dari pengamatan penulis masih adanya ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan, misalnya saja pembangunan infrastruktur, rehabilitasi tempat ibadah dll. Hanya sektor ekonomi saja melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi yang pendiriannya diinisiasi oleh PT. Holcim yang terlihat mulai mandiri.

⁶ Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability (hal 41) ,2008, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

BMT Swadaya Pribumi dibentuk dan dikelola oleh masyarakat Klapanunggal dengan difasilitasi oleh PT. Holcim pada bulan Agustus 2006. Bantuan awal diberikan berupa penyediaan tempat operasional, penyediaan modal dasar, peralatan kerja dan pelatihan manajemen BMT bagi pengurus. Selain itu juga diberikan bantuan modal dasar sebesar Rp. 526 juta yang diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 201 juta pada tahun 2006, tahap kedua sebesar Rp. 150 juta pada tahun 2007 dan tahap ketiga sebesar Rp. 175 juta pada tahun 2008. Selain itu pada tahun 2008, BMT ini juga mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp. 450 juta. Kinerja yang baik ditunjukkan oleh prosentase kenaikan total aset dan total nasabah sejak tahun 2006. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2. Perkembangan Nasabah dan Aset BMT Swadaya Pribumi Tahun 2006-2008

No	Uraian Tahun	Nasabah (Orang)	% kenaikan	Aset (Rp.)	% kenaikan
1.	2006	511		360.443.929.-	
2.	2007	1.213	137	1.031.794.895.-	186
3.	2008	2.295	349	2.893.779.574.-	596

Sumber : Laporan Keuangan BMT Swadaya Pribumi (diolah)

Namun data-data diatas tidak diimbangi dengan kelengkapan data tentang pemberdayaan masyarakat yang menjadi dasar penelitian ini. Sehingga atas dasar uraian di atas, maka menjadi menarik topik ini untuk diteliti terutama pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (Community Relations)* terhadap pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi.

1.2 Perumusan Masalah

Sejak didirikan oleh PT. Holcim pada tahun 2006, kinerja BMT Swadaya Pribumi dari segi aset dan jumlah nasabah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hal ini terlihat dalam laporan keuangan BMT Swadaya Pribumi yang disusun setiap tahun dan dilaporkan kepada PT. Holcim sebagai salah satu pengawas BMT. Sesuai tujuan pembentukannya, BMT didirikan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sehingga dapat mandiri dan tidak tergantung pada perusahaan. Oleh karena itu dalam indikator keberhasilan BMT, salah satunya adalah bahwa masyarakat dapat berusaha secara mandiri dalam menghidupi dirinya dan anggota keluarganya, misalnya dengan kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, kesehatan anggota keluarga yang terpantau dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Namun pada kenyataannya indikator ini tidak dievaluasi oleh pengurus BMT sehingga kondisi masyarakat tidak terpantau dengan baik.

Oleh karena itu pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian ini adalah apakah indikator yang berkaitan dengan pemberdayaan tersebut sudah tercapai terhadap para nasabah BMT Swadaya Pribumi? Jika belum faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat tersebut? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana alternatif strategi kebijakan perusahaan untuk perbaikan program *Community Relations*-nya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di masa datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian dari tesis ini dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terkait pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi.
2. Merumuskan alternatif strategi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan *Community Relations* PT. Holcim dalam bidang pemberdayaan masyarakat

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang menggambarkan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Menurut Winarno Sukaromad, metode deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data digunakan beberapa cara antara lain :

- 1) Studi kepustakaan.
- 2) Studi lapangan yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. kuesioner

1.4.2 Validitas Data

Untuk memperoleh kebenaran, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Patton, triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 1990: 178). Triangulasi data dari penelitian ini diperoleh dengan meng-*cross check* informasi antara hasil penelitian dengan dokumen perusahaan yang berkaitan.

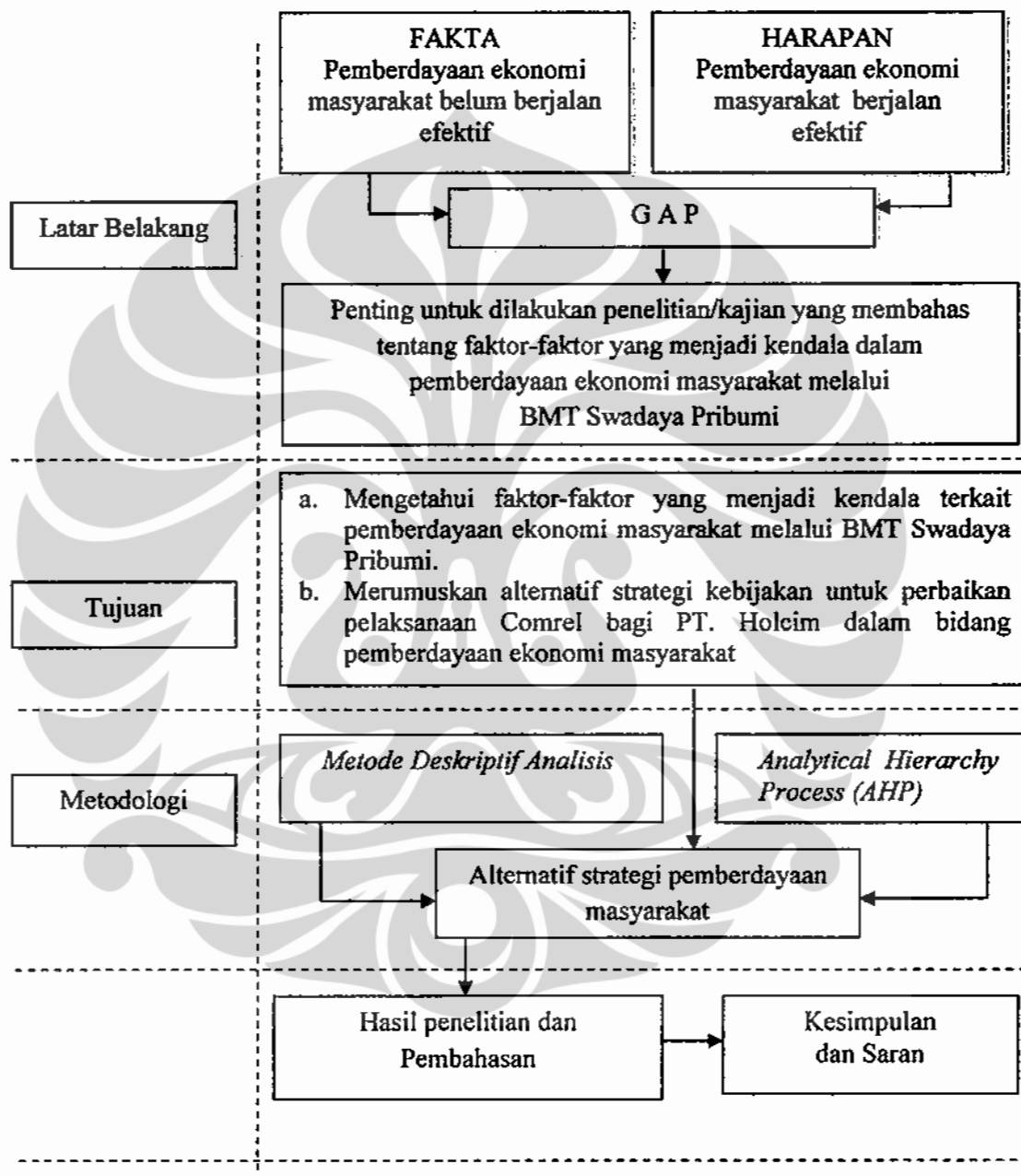
1.4.3 Peralatan Penelitian

Untuk melihat pemberdayaan yang terjadi di kecamatan Klapanunggal, metode AHP digunakan karena alasan keterbatasan data sekunder yang ada, yaitu data tentang indikator pemberdayaan masyarakat dengan adanya BMT Swadaya Pribumi. Selain itu dengan berbagai faktor keterbatasan yang ada di kecamatan Klapanunggal, diperlukan pendapat dari perwakilan stakeholder yang ada secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu alasan digunakan metode AHP adalah bahwa metode ini dapat fleksibel / tidak kaku dalam penerapannya. Artinya dapat menyesuaikan dengan situasi dan hasilnya tidak selalu besaran atau angka. Dalam pemrosesan informasi yang dipakai bukan semata aturan dan model matematika, tetapi juga imajinasi peramal.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, yaitu metode pengambilan keputusan yang memanfaatkan persepsi responden yang dianggap expert sebagai input utamanya.

Kriteria “expert” di sini bukan berarti bahwa orang tersebut haruslah jenius, pintar dan sebagainya tetapi lebih mengacu pada orang yang mengerti benar (Permadi,1992: hal 5).

1.4.4 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penelitian

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- 1) **Perusahaan;** dijadikan bahan perbandingan dengan evaluasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan strategi pelaksanaan program Comrel di masa depan.
- 2) **Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;** bahan evaluasi program / kegiatan yang selanjutnya dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam program CSR khususnya pemberdayaan masyarakat
- 3) Sebagai **referensi** untuk penelitian selanjutnya

1.6 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup disini dimaksudkan sebagai batasan penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan penelitian ini hanya melingkupi pelaksanaan comrel PT. Holcim terhadap pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya pribumi di Kecamatan Klapanunggal dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Bantuan dari perusahaan selain PT. Holcim terhadap masyarakat kecamatan Klapanunggal tidak akan dibahas pada penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemikiran, lalu secara rinci akan dibahas mengenai identifikasi masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, sumber data, sistematika penulisan serta kerangka pikir penelitian.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka Tentang Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan Corporate Social Responsibility

Bab ini akan membahas mengenai teori yang melandasi penelitian dari hasil telaah kepustakaan dan hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan.

Bab 3 : Metodologi Penelitian

Bab ini akan membahas tahapan-tahapan dalam pendekatan AHP, deskripsi responden serta metode pemilihan permasalahan utama dalam

pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi dengan pendekatan AHP.

Bab 4 : Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Hasil Temuan Lapangan

Dalam gambaran umum akan diuraikan mengenai keberadaan atau kondisi dari obyek yang diteliti, dimana dalam hal ini diantaranya akan dijabarkan mengenai kondisi lokasi penelitian dan gambaran pelaksanaan CSR dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi.

Bab 5 : Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini disajikan gambaran hasil Analisa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi serta analisa deskriptif tentang indikator pelaksanaan CSR.

Bab 6 : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEMISKINAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tentang kemiskinan, definisi, perkembangan pendekatan dan program tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia dan di Indonesia. Pembahasan tentang CSR juga akan mencakup beberapa teori lainnya yang terkait seperti tentang pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat serta tinjauan penelitian lain yang mendukung studi ini.

Uraian tersebut dijelaskan untuk memperoleh kerangka pemikiran mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan CSR. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan tingkat kesejahteraan dapat meningkat sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan khususnya di lokasi penelitian dapat tercapai secara bertahap.

2.1 Kemiskinan

Pada umumnya kemiskinan dapat diukur dari tingkat pendapatan dan kebutuhan. Menurut Bank Dunia definisi keadaan miskin sebagai "*poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standard across whole socciety*". Artinya secara ringkas kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Menurut Kartasasmita (1996: 234-235) tentang kemiskinan absolut, bahwa seseorang dikatakan miskin secara absolut bila tingkat pendapatan lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang lebih kaya.

Sebab-sebab kemiskinan menurut Sumodiningrat (1999:18) dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) sebab yang berasal dari dalam individu sendiri atau internal (meliputi tingkat pemilikan faktor produksi yang rendah, kualitas sumberdaya manusia yang rendah seperti tingkat pendidikan yang rendah, tingkat tabungan yang rendah akibat pendapatannya yang habis dipakai untuk konsumsi, serta lemahnya jiwa wiraswasta) dan 2) sebab yang berasal dari luar individu atau eksternal (meliputi aspek kelembagaan, sosial budaya, prasarana ekonomi dan transportasi yang kurang memadai, konsekuensi dari tahap permulaan proses pembangunan).

Berdasarkan definisi dan sebab kemiskinan menurut Sumodiningrat (1999: 45-47) bahwa masalah kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata, melainkan bersifat multidimensi sehingga tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi tetapi juga berurusan dengan kesejahteraan sosial. Adapun dimensi-dimensi kemiskinan yaitu :

- a. Dimensi ekonomi atau material dengan ukuran kuantitatifnya menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang dan perumahan.
- b. Dimensi sosial dan budaya dengan ukurannya bersifat kualitatif yaitu lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantung-kantung kebudayaan yang disebut kebudayaan kemiskinan demi kelangsungan hidup mereka.
- c. Dimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis.

Inti dari uraian di atas adalah bahwa kemiskinan sebagai fenomena sosial tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga berdimensi struktural, kultural, psikologis sehingga upaya mengurangi kemiskinan harus bersifat multidimensi. Perencanaan pembangunan harus menghayati dan memahami inti permasalahan kemiskinan tanpa mengabaikan ciri dan dimensinya sehingga upaya mengurangi kemiskinan tidak terbatas pada pengadaan dan alokasi aset, pelayanan sosial serta peningkatan pendapatan tetapi juga peningkatan *self respect* dan peluang untuk mobilitas sosial serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan.

2.2 Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Stakeholder adalah semua orang dan kelompok yang dapat dipengaruhi atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan dan kegiatan suatu organisasi sehingga membentuk suatu lingkungan dimana perusahaan berinteraksi (Post JE, et all. 2000). Interaksi perusahaan dilakukan terhadap dua kelompok stakeholder yaitu primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah kelompok-kelompok yang secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan barang dan jasa kepada masyarakat. Termasuk dalam stakeholder primer diantaranya adalah pekerja (menjual tenaga kerja) pemegang saham (menanam modal), para pelanggan (membeli produk) Sedangkan stakeholder sekunder adalah semua kelompok dalam masyarakat yang dapat dipengaruhi langsung maupun tidak langsung oleh dampak sekunder beroperasinya suatu perusahaan. Unsur yang termasuk dalam stakeholder sekunder adalah masyarakat lokal (masalah pekerjaan dan lingkungan), pemerintah (terkait masalah peraturan dan pajak)

Pemikiran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan, berawal dari konsep hubungan antara negara dengan masyarakat. Dikatakan bahwa negara tak bisa berdiri tanpa adanya masyarakat, demikian juga perusahaan. Bagaimanapun juga, realisasi perusahaan pasti melibatkan pemilik, pelanggan, penyalur, pekerja dan masyarakat. Pada proses ini, sebuah perusahaan bukan hanya dimasukan ke dalam wilayah swasta (*private*), melainkan juga publik (Ali F dan Fauzi IA, 1998). Artinya aktivitas suatu perusahaan pasti bersinggungan dengan aktivitas masyarakat secara luas.

Berlandaskan pada pendekatan stakeholder (pemangku kepentingan), beroperasinya perusahaan akan semakin penting dalam jaman globalisasi ini. Perusahaan mempunyai kepentingan yang dipertaruhkan dalam operasinya diantaranya kepentingan mereka yang berada di luar perusahaan, seperti masyarakat di sekitarnya, dari segi kesempatan kerja misalnya, apakah perusahaan itu menguntungkan atau merugikan *local business people*, dari dampaknya terhadap kualitas hidup mereka, lingkungan hidup, pemerintah daerah dan lokal.

Perusahaan, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat mempunyai keterkaitan yang tinggi. Aktivitas perusahaan mempunyai dampak pada

masyarakat, dan banyak keputusan pemerintah yang berpengaruh langsung atau tidak langsung pada perusahaan. Kemudian secara bersama, baik keputusan pemerintah atau perusahaan mempunyai dampak lanjutan pada berbagai lapisan masyarakat (Post JE. et all, 2000).

Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu kontrak sosial yang tidak dapat dihindari perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari kendala dan tantangan yang dihadapi. Misalnya persepsi pimpinan perusahaan yang masih banyak sependapat dengan Friedman, bahwa melakukan tanggung jawab sosial adalah pemborosan dan tidak sesuai dengan tujuan bisnis yaitu mencetak laba sebesar-besarnya. Sejalan dengan era globalisasi sekarang ini, persepsi pimpinan perusahaan semakin banyak yang merespon dengan baik konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan pola pemberdayaan masyarakat. Intinya adalah para pimpinan perusahaan harus memiliki kesadaran bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk masyarakat. Perusahaan harus dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya melebihi atau bekerja secara paralel dengan usaha mereka dalam memperoleh keuntungan (Bowen HR, 1953).

2.3 Corporate Social Responsibility

2.3.1 Pengertian

Banyak definisi / pengertian yang ada selama ini tentang CSR, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Welford, 2003:

Corporate Social Responsibility as the continuing commitment by bussiness to behave ethically and contribute to economic development while improving the equality of life of the work force and their families as well as the local community and society at large.

Jadi dalam hal ini tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen yang berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak secara etis dan berperan dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka seperti halnya kepada masyarakat umum secara luas. Artinya sedapat mungkin perusahaan berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat dengan ikut bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak masyarakat /

pekerjanya saat perusahaan melakukan proses produksi maupun pasca produksi mengingat banyaknya limbah / kerusakan yang diderita masyarakat selama ini.

Definisi lain yang sarat dengan nuansa ekonomi juga dikemukakan oleh David R. Korten dimana ia menyoroti aspek tanggung jawab sosial sebagai berikut (Korten, 2001: 238) :

1. Suatu perusahaan harus memiliki pendekatan yang difokuskan pada teori pasar (permintaan dan penawaran) dan tidak terjebak pada pemahaman sifat alami korporasi (yang hanya berusaha mencari untung yang sebesar-besarnya) dan memiliki struktur tanggung jawab yang fleksibel (dalam hal ini perusahaan jangan hanya merasa bertanggung jawab pada batas tertentu saja). Namun dalam hal ini perusahaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap perbaikan lingkungan, kesehatan yang ada di sekitar lokasi perusahaan tersebut.
2. Perusahaan harus bisa meyakinkan semua stakeholder untuk dapat secara bebas mengakses informasi yang relevan. Misalnya informasi tentang neraca laba rugi perusahaan, total penjualan dan lain-lain. Kondisi ini nantinya akan menawarkan suatu pendekatan market based bagi perusahaan untuk menjadi bagian dari unit sosial yang bertanggung jawab.

Untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan ini penting kiranya bagi suatu organisasi memikirkan sejumlah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan strategi itu harus mempertimbangkan berbagai hal sebagai berikut (Canon, 2000:257) :

- a. Jangkauan kegiatan organisasi
- b. Kesesuaian kegiatan organisasi dengan lingkungan
- c. Kesesuaian kegiatan organisasi dengan kapasitas sumber daya
- d. Alokasi dan relokasi sumber daya utama dalam organisasi
- e. Nilai, harapan dan tujuan strategi yang berpengaruh
- f. Implikasi terhadap perubahan di seluruh organisasi

Pengertian CSR yang lain dan ternyata lebih banyak dipakai adalah menurut *World Business Council for Sustainable Development*, yaitu komitmen berkelanjutan dari bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi bagi

pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawannya beserta keluarga, serta masyarakat lokal ataupun masyarakat luas.

2.3.2 Program Corporate Social Responsibility

Menurut Kotler (2005), terdapat enam program CSR, yaitu : (1) *Cause Promotions*: Dalam bentuk memberikan kontribusi dana/penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu, misalnya bahaya narkoba; (2) *Cause Related Marketing*: Bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan prosentase tertentu dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu, untuk periode waktu tertentu/produk tertentu.; (3) *Corporate Social Marketing*: Perusahaan membantu pengembangan maupun implementasi dari kampanye dengan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif misalnya kebiasaan berlalu lintas yang tertib; (4) *Corporate Philantrophy*: Inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi ataupun sumbangan amal; (5) *Community Voluntering*: Dalam aktivitas ini perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat membantu masyarakat setempat; (6) *Social Responsible Business Practices*: Sebuah inisiatif dimana perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan

2.3.3 Dasar Hukum CSR

Acuan klasifikasi tanggung jawab sosial dunia usaha didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, 2005):

1. Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-Undang ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Dalam Undang-Undang BUMN dinyatakan bahwa selain mencari

keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat.

2. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Meskipun undang-undang ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (pasal 34), Undang-Undang ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

3. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumberdaya alam, wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat1).

Sampai saat penelitian ini ditulis, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No 40 tahun 2007 belum dikeluarkan oleh Pemerintah. Demikian pula bentuk peraturan lain yang sifatnya menjadi dasar pelaksanaan CSR di Indonesia, baik berupa Peraturan Presiden, Keputusan Presiden maupun peraturan Menteri.

2.3.4 Dimensi dan Indikator Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk mengukur kinerja perusahaan dalam hal pelaksanaan CSR ini sudah banyak lembaga internasional yang mengeluarkan sejumlah *Indicator Performance* yang mencakup semua bidang. Salah satu lembaga yang mengeluarkan standardisasi tersebut adalah *Business for Social Responsibility*. Lembaga ini menyajikan sejumlah indikator CSR, namun yang ditampilkan hanya yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam prakteknya, pengukuran kinerja yang menggunakan indikator ini hasil verifikasinya harus ada pengesahan dari konsultan independen yang mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang CSR. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan unsur subyektif dalam penilaian kinerja CSR suatu perusahaan. Indikator tersebut antara lain :

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

a. Transparansi kegiatan perusahaan.

Transparansi di sini dimaksudkan bahwa semua kegiatan perusahaan maupun laporan keuangan dapat diakses oleh publik/masyarakat lewat media internet, koran maupun media lainnya.

b. Ada keterikatan yang baik dengan stakeholder lewat jalinan komunikasi yang intens.

Pertemuan dan dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingan yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun bagi perusahaan merupakan cara untuk mendekatkan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan.

2. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

a. Adanya aturan umum tentang bagaimana prosedur keterlibatan komuniti dengan kegiatan perusahaan.

Prosedur ini menyebutkan kriteria kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat dan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat.

b. Perusahaan ikut terlibat dalam pengembangan ekonomi komunitas

Inisiasi pembentukan BMT merupakan bukti bahwa perusahaan berkomitmen dalam pengembangan masyarakat melalui sektor ekonomi.

c. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pekerja

Perekrutan masyarakat lokal sebagai pekerja dilakukan dengan tetap melalui proses yang adil dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga masyarakat yang diterima oleh perusahaan merupakan hasil seleksi yang memenuhi ketentuan perusahaan.

d. Perusahaan memiliki kedermwanaan untuk memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat.

Kegiatan sosial seperti bantuan hewan kurban, bantuan rehabilitasi masjid, sunatan masaal dan bantuan sembako bagi masyarakat dilakukan perusahaan sebagai bagian dari komunitas lokal Klapanunggal.

2.4 Pendapat tentang CSR

Walaupun CSR sudah banyak diterima dan dilaksanakan oleh banyak perusahaan di dunia, tetap saja menimbulkan pro (mendukung) dan kontra (menolak) terutama di kalangan ahli ekonomi. Salah satu tokoh yang menolak diantaranya adalah Milton Friedman, ekonom peraih penghargaan Nobel. Sedangkan kalangan yang pro terhadap CSR diwakili oleh Robbins dan Coulter. Tabel 2.2 di bawah ini memperlihatkan alasan kalangan yang menolak dan menerima CSR, diantaranya :

Tabel 2.2 Pendapat Pro dan Kontra tentang Penerapan CSR

Pendapat yang Mendukung		Pendapat yang Menentang	
1.	<u>Ekspektasi Publik :</u> Opini publik saat ini mendukung aktivitas bisnis yang mengejar tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan sosial secara bersamaan.	1.	<u>CSR dapat menghambat Operasi Sistem pasar Bebas :</u> Friedman berpendapat para pengelola CSR dapat dibenarkan apabila kegiatan CSR yang menggunakan sumberdaya perusahaan memberikan kontribusi bagi optimalisasi laba bagi perusahaan. Hal ini sulit dilakukan karena belum pernah ada penelitian yang mengukur hubungan pelaksanaan CSR perusahaan dengan tingkat optimalisasi laba perusahaan.
2.	<u>Laba Jangka Panjang :</u> Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial cenderung memiliki laba jangka panjang yang lebih aman	2.	<u>Ketidakjelasan tujuan :</u> Mengejar tujuan sosial akan mengakibatkan ketidakjelasan pencapaian tujuan utama perusahaan, yaitu produktivitas secara ekonomi
3.	<u>Kesan Publik :</u> Pelaku bisnis dapat menciptakan kesan publik yang baik bila mereka memiliki tujuan-tujuan sosial.	3.	<u>Beban Biaya:</u> Berbagai pelaksanaan program CSR merupakan beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan
4.	<u>Kepentingan Pemegang Saham :</u> Tanggung jawab sosial akan harga saham perusahaan dalam jangka panjang		Perusahaan tidak punya keahlian dalam mengelola CSR: Pemimpin perusahaan umumnya tidak punya keahlian dalam penanganan permasalahan sosial.

Sumber ; Robbins, Mary dan Coulter tahun 2003

Friedman menyimpulkan bahwa doktrin tanggung jawab sosial perusahaan bisa merusak sistem ekonomi pasar bebas. Selanjutnya dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu akan mengakibatkan siste ekonomi menjurus ke arah ekonomi berencana dari negara-negara komunis. Dalam masyarakat bebas, hanya terdapat satu tanggung jawab sosial untuk bisnis, yakni memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungannya, selama itu masih sebatas aturan main, artinya, melibatkan dalam kompetisi yang terbuka dan bebas tanpa penipuan atau kecurangan (dalam Bertens K. 2000).

Kritik tersebut dibantah melalui teori stakeholders, yang menyatakan bahwa di samping stockholders, masih ada stakeholder lain yang berhak untuk diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan. Pembahasan mengenai teori stakeholder yang menunjukkan sebagai pandangan yang mendukung terhadap tanggung jawab sosial perusahaan ini telah dibahas pada bagian terdahulu.

Selain berbagai teori yang mendasari operasi perusahaan dalam melakukan kegiatan sosialnya, CSR juga terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang akan dijelaskan pada berikut ini.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa pengertian konsep pemberdayaan serta strategi pemberdayaan masyarakat.

2.5.1 Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat diambil dari istilah *empowerment* yang artinya konsep dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, yang memandang inisiatif-kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang akan dicapai proses pembangunan. Menurut Pranaka, Sutrisno (2003:133), menyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu :

- 1) Kecenderungan primer, yaitu pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.

- 2) Kecenderungan sekunder, yaitu pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Hal-hal yang penting yang mesti diperhatikan pada masalah pengembangan masyarakat, seperti disampaikan oleh Arthur Dunham dalam bukunya *Community Welfare Organization*, Isbandi (2003:218), yaitu :

- 1) Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut, dimana pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat, dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya untuk aspek kesehatan, rekreasi ataupun kesejahteraan dalam arti sempit saja.
- 2) Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, dimana tidak hanya menekankan pada pendekatan multi profesi, tetapi juga multi lapisan profesi (*multi vocational*), karena disini diperlukan adanya keterlibatan layanan yang sub profesional, selain layanan yang profesional.
- 3) Kebutuhan terhadap adanya *community worker* yang serba bisa pada wilayah pedesaan, dimana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaan yang berbeda.
- 4) Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal sekaligus para petugas harus benar-benar tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada, bukan sekedar memperkenalkan ataupun membawa teknologi yang baru ke masyarakat.
- 5) Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat, sehingga harus dilakukan bersama dan bukan sekedar untuk masyarakat.

Lebih jauh lagi, pemberdayaan dalam konteks manajemen berkaitan dengan wewenang (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Secara sederhana wewenang merupakan hak untuk memutuskan dan memerintah orang lain, sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengusahakan atau mencegah sesuatu terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Stewart (1998)

berpendapat bahwa pemberdayaan bertujuan menghapuskan halangan-halangan yang hanya memperlamban reaksi dan merintang aksi mereka. Selanjutnya Stewart (1998) menyatakan bahwa pemberdayaan menuntut perluasan peran, wewenang dan kekuasaan serta bertambahnya keluwesan tentang bagaimana peran-peran tersebut dilakukan. Pemberdayaan tidak berarti melepaskan tanggung jawab tentang apa yang terjadi dalam tim, departemen, bagian atau organisasi. Pemberdayaan artinya adalah upaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara struktur dan pengendalian manajemen yang longgar melawan yang ketat. Sehingga dengan adanya keseimbangan dan perluasan konsep, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995).

Selanjutnya Kusnaka dalam Harry Hikmat (2002), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

2.5.2 Karakteristik, Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat

Karakteristik atau ciri khas pemberdayaan masyarakat merupakan suatu gerakan yang diarahkan terhadap dua komponen yaitu penggerak dan masyarakat yang digerakkan secara bersamaan. Sinergi antara kedua komponen itu akan menghasilkan kemampuan, kemandirian, kinerja dan karya kepada penggerak maupun kepada masyarakat yang digerakkan sehingga mempunyai pengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan kelembagaannya. Lebih jauh, pemberdayaan masyarakat berorientasi pada membangun masyarakat yang mandiri sehingga pembangunan masyarakat mempunyai ciri dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Berkaitan dengan karakteristik pemberdayaan masyarakat, Glen (1993:24) menggambarkan bahwa ada 3 (tiga) unsur dasar yang menjadi ciri khas pendekatan ini, yaitu :

- 1) Tujuan dari pendekatan ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam pendekatan ini, *community worker* sebaiknya mendasarkan pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat untuk mengawali proses pengembangan masyarakat. Pandangan ini agak kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang tidak disadari oleh masyarakat tetapi disadari oleh agen perubah. Pengalaman penulis selama mengikuti proses perencanaan di desa mendukung pernyataan ini, mereka lebih mengutamakan keinginan dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan mereka.

- 2) Proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.

Prasyarat yang diajukan oleh Glen adalah adanya kerjasama dan kreativitas sebagai dasar pengembangan masyarakat yang baik. Namun sulit sekali mendapatkan kondisi masyarakat yang tanpa konflik sehingga *community worker* harus memperhatikan masalah konflik ini dalam meningkatkan peran serta masyarakat.

- 3) Praktisi yang menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat Non-Direktif (partisipatif)

Elemen ketiga ini menggambarkan bahwa peran *community worker* pada pendekatan ini lebih difokuskan pada peran untuk pemercepat perubahan (*enabler*), pembangkit semangat (*encourager*) dan pendidik (*educator*). Menurut Glen, dalam pengembangan masyarakat, pendekatan non-direktif lebih tepat diterapkan dibandingkan pendekatan direktif (instruktif).

Berkaitan dengan strategi pemberdayaan, Hikmat (2001:19) menyatakan bahwa ada tiga strategi pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu:

- 1) **Strategi tradisional**, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan

- 2) **Strategi *direct action***, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.
- 3) **Strategi *transformatif***, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Sedangkan teknik untuk mendekati masyarakat guna terciptanya perubahan sosial menurut Susanto dalam Beratha (1982:50) yaitu :

- 1) **Teknik *persuasion***, artinya untuk merubah perilaku orang diperlukan teknik pendekatan dan tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- 2) **Teknik *compulsion***, artinya mengubah dulu tindakan orang seorang atau sekelompok orang walaupun sebenarnya mereka belum menyetujui sepenuhnya apa yang dianjurkan
- 3) **Teknik *pervasion***, yaitu mengulang apa yang diharapkan agar masuk dalam bidang bawah sadar seseorang sehingga mengubah sikap diri sesuai dengan apa yang diulangi.
- 4) **Teknik *coersion***, yaitu memaksa masyarakat secara langsung untuk mengadakan perubahan sikap dan dapat disertai dengan hukuman fisik maupun denda.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk negara berkembang seperti Indonesia, lebih cocok mendekati masyarakat menggunakan teknik *persuasion* dan *compulsion* yang sesuai dengan situasi psikologis dan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, strategi pemberdayaan pada intinya adalah suatu proses yang disengaja untuk membantu, mendorong dan mengaktualisasikan potensi suatu masyarakat tertentu agar dapat mengetahui kemampuan yang mereka miliki dan memanfaatkan potensi tersebut.

Uraian pada bagian ini merupakan pemikiran yang mendasari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai acuan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif strategi bagi pelaksanaan CSR PT. Holcim di masa datang.

2.6 Peran Pemerintah melalui Program Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM)

Salah satu strategi yang diambil dalam upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam dua upaya, yakni (1) mengurangi beban pengeluaran dan (2) meningkatkan produktivitas guna meningkatkan pendapatannya. Upaya pertama dilakukan dengan lebih meningkatkan alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berupa infrastruktur pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Sedangkan untuk upaya kedua yaitu meningkatkan produktivitas dilaksanakan melalui pemberdayaan manusia/masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan produktivitas dalam penanggulangan kemiskinan adalah melalui Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM) yang dibentuk sejak tahun 2005. Program ini merupakan suatu gerakan masyarakat lokal dalam upaya melepaskan diri dari kemiskinan yang difasilitasi dan dimotivasi oleh pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan (pemandirian) dan penguatan modal. Penguatan modal dilakukan dengan memberikan pinjaman modal melalui mediator perguliran (lembaga bank dan bukan bank yang ditunjuk oleh pemda untuk menjadi lembaga penyalur dan pengembalian dana GMM).

Upaya-upaya tersebut di atas menempatkan kelompok masyarakat miskin sebagai pelaku utama dalam program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dalam kerangka program Gerakan Masyarakat Mandiri, sedangkan pelaku-pelaku lain bertindak sebagai pengarah, fasilitator dan motivator.

• Tujuan GMM

Tujuan yang ingin dicapai melalui Gerakan Masyarakat Mandiri adalah :

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan kegiatan usaha produktif
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat miskin untuk lebih berdaya dan mandiri

3. Meningkatnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan dan dapat memanfaatkan kegiatannya untuk keluarga dan lingkungannya.

- **Sasaran**

Sasaran dari Program gerakan Masyarakat Mandiri, yaitu :

1. Kelompok masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah dan termasuk kelompok usia produktif
2. Kelompok masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria lembaga-lembaga pemandirian dan atau lembaga perguliran, khususnya LKM-LKM.
3. Penerima kredit ditentukan berdasarkan aspek-aspek ekonomi
4. Kelompok usaha kecil produktif

- **Pendekatan Pelaksanaan Program**

Program ini dirancang dan diimplementasikan melalui beberapa pendekatan, yaitu :

1. **Pendekatan Komunitas**

Berawal dari kenyataan di lapangan bahwa dalam satu komunitas akan ditemui beragam masalah dan beragam karakteristik sasaran yang memiliki sumberdaya dan potensi yang juga beragam sehingga program tidak dirancang dan diimplementasikan dengan pendekatan top down. Sasaran dilibatkan mulai dari menentukan jenis usaha, merencanakan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi. Melalui pendekatan ini diharapkan hubungan antar UMKM di beberapa lokasi yang berbeda akan tetap pada satu jaringan usaha.

2. **Kemitraan bagi Ekonomi Lokal**

Kemitraan ini diwujudkan dalam upaya mempromosikan UMKM dan menghubungkannya kepada jaringan yang lebih besar sehingga skala UMKM akan semakin berkembang.

3. **Jaringan Usaha**

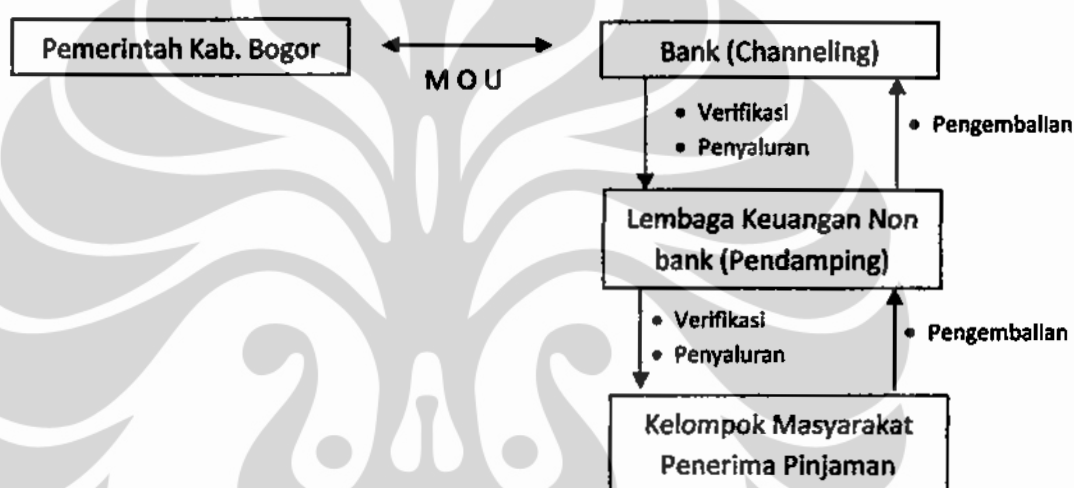
Program dilaksanakan dengan pendekatan bahwa usaha di desa merupakan bagian dari sebuah jaringan usaha baik lokal, regional maupun nasional.

4. Kluster Aktivitas Ekonomi

Kluster adalah kelompok kegiatan ekonomi yang didasarkan pada pengembangan komoditas melalui sistem keterkaitan antar komponen mulai dari kegiatan pra produksi (industri hulu) sampai paska produksi (industri hilir)

• Mekanisme penyaluran dan pengembalian dana GMM

Salah satu mekanisme penyaluran dan pengembalian dana GMM dilakukan melalui Lembaga Non Bank / lembaga keuangan Mikro (termasuk Baitul Maal Wat Tamwil/BMT), seperti dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Panduan Program Gerakan Masyarakat Mandiri

Gambar 2.1 Model Perguliran pada Lembaga Keuangan Mikro

• Indikator Keberhasilan Dampak

Pelaksanaan GMM di Kabupaten Bogor diharapkan mempunyai dampak sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sejak pendataan sampai waktu pelunasan bantuan kredit
2. Produktivitas usaha meningkat dilihat dari siklus usaha
3. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja serta munculnya kegiatan-kegiatan usaha milik masyarakat.

- **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dilakukan terutama terhadap kelompok masyarakat sasaran sebagai subyek utama dari GMM. Lembaga yang wajib melakukan monitoring adalah Tim Koordinasi Pelaksanaan Program (TKPP), lembaga perbankan, lembaga pemandirian atau lembaga perguliran dan lembaga independen. Aspek yang dimonitoring mencakup (1) aktivitas anggota, (2) perkembangan kegiatan kelompok, (3) pertumbuhan jumlah anggota kelompok.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan satu kali dalam setahun. Biasanya kegiatan ini dilakukan menjelang akhir tahun anggaran berakhir, sekitar bulan Nopember – Desember. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dijadikan acuan dalam perbaikan pelaksanaan program di tahun selanjutnya. Kendala yang muncul dalam kegiatan ini adalah ketersediaan tenaga karena banyaknya kegiatan yang harus dimonitoring, Solusi yang diambil biasanya diambil beberapa lokasi yang menjadi sampel atau lokasi yang di dalamnya ada beberapa program yang harus dimonitoring.

2.7 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada bagian ini penulis akan dijelaskan tentang kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi target penyaluran dana dari BMT Swadaya Pribumi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa semua yang menjadi nasabah BMT termasuk kategori pengusaha mikro dilihat dari 2 kriteria yang ada yaitu kekayaan bersih yang dimiliki dan hasil penjualan tahunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disajikan pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kriterianya

No	Uraian	Kriteria
1.	Usaha Mikro : Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan	a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2.	Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar	a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3.	Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.	a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.8 Kajian Penelitian Terdahulu

Selain berbagai teori dan literatur di atas, penelitian ini juga penting mencermati pembelajaran berbagai penelitian atau kajian sejenis sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut :

- 1) Nurdiana (2008) melakukan penelitian mengenai efektivitas implementasi Corporate Social Responsibility PT. Kaltim Prima Coal yang berlokasi di Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan pengukuran efektivitas pelaksanaan program CSR dan *community development* dengan menggunakan kriteria efektivitas yang berasal dari kriteria pelaksanaan CSR. Relevansi dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya, yaitu pada implementasi dari program CSR suatu korporasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis Importance Performance Analysis. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari alat analisis yang digunakan.
- 2) Laili (2006) melakukan penelitian mengenai strategi rekonstruksi program *community development* perusahaan Panas Bumi yang berlokasi di Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Relevansi dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya, yaitu pada implementasi dari program CSR suatu korporasi dalam hal ini adalah memformulasikan pemecahan masalah atas penyelenggaraan program *community development*. Penelitian ini menggunakan alat analisis Importance Performance Analysis serta Quantitative Strategic Performance Matriks. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari alat analisis yang digunakan
- 3) Iqbal (2005) melakukan penelitian tentang analisa kebijakan forum pengkajian perencanaan tahunan terhadap strategi pemberdayaan masyarakat di propinsi DKI Jakarta. Relevansi dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya, yaitu pada strategi pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya menggunakan Analisis SWOT.
- 4) Jahja (2004) melakukan penelitian mengenai efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan kepada komunitas. Relevansi penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk implementasi dari pelaksanaan CSR eksternal yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran

efektivitas pelaksanaan program CSR dan *community development* dengan menggunakan kriteria efektivitas yang berasal dari kriteria pelaksanaan CSR dan *community development* yang ideal dan dikombinasikan dengan kriteria efektif penerima manfaat yang diketahui melalui survei.

Hasil-hasil penelitian di atas tidak ada yang menggunakan alat analisis AHP dalam mencari jawaban penelitian. Oleh karena itu penulis mencoba menggunakan AHP yang diyakini cocok diterapkan dalam penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui BMT, dilihat dari kondisi data sekunder yang ada di lapangan.

Dari beberapa penelitian tersebut, beberapa pembelajaran yang dapat disarikan untuk penelitian CSR terkait peran PT. Holcim dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Klapanunggal antara lain adalah :

- a) Faktor pendamping (*community worker*) yang sangat berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaan yang berbeda.
- b) Proses pelaksanaan setiap tahapan kegiatan yang melibatkan masyarakat, dimana masyarakat diberi kemandirian untuk memutuskan.
- c) Dukungan dari internal perusahaan yang solid menjadi faktor yang mendorong keberhasilan pelaksanaan program.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL TEMUAN LAPANGAN

Pada bagian ini penulis akan menggambarkan secara umum lokasi penelitian, dan gambaran hasil temuan di lapangan.

3.1 Profil Kecamatan Klapanunggal

Penulis melakukan penelitian di kecamatan Klapanunggal, merupakan salah satu nama wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor. Selanjutnya akan dijelaskan kondisi secara umum mengenai wilayah Klapanunggal.

3.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Klapanunggal berada di ketinggian 200 – 260 di atas permukaan laut (dpl) dengan curah hujan sebesar 132 mm/tahun. Kontur daerahnya terdiri atas dataran rendah di bagian barat lalu berbukit di bagian tengah dan bergunung-gunung di bagian timur. Jika dilihat dari prosentase bentuk wilayah maka prosentase bentuk datar sampai berombak \pm 18,7%, berombak sampai berbukit sebesar 23,5% dan berbukit sampai bergunung sebesar 57,8%. Luas Kecamatan Klapanunggal sebesar 9.764 Ha, terdiri dari 96,44% berupa lahan kering dan sisanya sebesar 3,56% berupa lahan sawah (irigasi dan tadah hujan). Wilayah Kecamatan Klapanunggal berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain, seperti :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cileungsi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sukamakmur dan Citeureup
- Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Putri
- Sebelah Timur : Kecamatan Jonggol dan Sukamakmur

3.1.2 Pemerintahan

Wilayah administratif kecamatan Klapanunggal terdiri dari :

- Jumlah desa : 9 desa, yaitu (Desa Klapanunggal, Nambo, Kembang Kuning, Lulut, Bantarjati, Cikahuripan, Leuwikaret, Bojong dan Desa Ligarmukti)
- Jumlah Dusun : 31 buah
- Jumlah RW sebanyak 61 buah dan RT sebanyak 184 buah

3.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Klapanunggal sebanyak 80.536 jiwa terdiri dari 40.763 orang laki-laki dan 39.536 orang perempuan dengan kepadatan sebesar 0,9 jiwa/Ha. Jumlah penduduk ini jika dirinci menurut usia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Komposisi Penduduk Kecamatan Klapanunggal menurut Umur

No	Uraian	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	0 – 4 tahun	8.651	10,74
2.	5 – 9 tahun	9.830	12,21
3.	10 – 14 tahun	9.004	11,18
4.	15 – 19 tahun	7.456	9,25
5.	20 – 24 tahun	7.310	9,08
6.	25 – 29 tahun	7.005	8,70
7.	30 – 34 tahun	6.609	8,21
8.	35 – 39 tahun	6.100	7,57
9.	> 40 tahun	18.571	23,06
	Jumlah	80.536	100,00

Sumber : Dokumen laporan semester I tahun 2008 Kecamatan Klapanunggal (Diolah)

Menurut informasi dari aparat kecamatan jumlah angkatan kerja di kecamatan Klapanunggal sebanyak 44.844 orang atau sebesar 55,68 % dari total penduduk, terdiri dari angkatan kerja laki-laki sebanyak 23.429 orang (29,09%) dan angkatan kerja perempuan sebanyak 21.415 orang (26,59%).

Lebih lanjut, jika komposisi penduduk tersebut dilihat menurut mata pencaharian maka terlihat sebagai berikut :

Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Klapanunggal menurut Mata Pencapaian

No	Uraian	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Petani	1.224	1,52
2.	Buruh Industri, Buruh Tani, Buruh Pertambangan	9.567	11,88
3.	Pedagang	2.213	2,75
4.	Pengemudi	2.627	3,26
5.	Pengusaha Industri Kecil	1.933	2,40
6.	Lain-lain : (pengusaha, pengrajin, PNS, pertukangan, TNI/Polri, pensiunan)	62.972	78,19
	Jumlah	80.536	100,00

Sumber : Dokumen laporan semester I tahun 2008 Kecamatan Klapanunggal (Diolah)

3.1.4 Kondisi Penduduk Miskin

Menurut Data Sensus Daerah Kabupaten Bogor tahun 2006, jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Klapanunggal sebesar 6.091 KK atau sebanyak 23.739 orang (29,5% total penduduk). Kehidupan mereka sangat tergantung dari hasil usahanya, yang kadang-kadang hanya cukup untuk makan. Bahkan dengan krisis ekonomi sekarang ini, kondisinya kian terpuruk dimana mereka sangat sulit untuk memperoleh tambahan modal untuk pembelian barang dagangan yang terus meningkat harganya. Untuk meningkatkan modal tersebut mereka tidak mampu mengakses sumber pendanaan dan tidak cukup mampu memenuhi persyaratan perbankan dalam agunan. Sehingga untuk mendapatkan modal usaha mereka akhirnya terpaksa meminjam kepada para rentenir dengan bunga yang sangat tinggi hingga 10-20% per bulan.

3.2. Gambaran Hasil Temuan Lapangan

3.2.1 Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)

Falsafah dasar pelaksanaan CSR atau lebih dikenal dengan *Community Relations* PT. Holcim adalah adanya keinginan untuk mengkaitkan tiga dimensi pembangunan yang berkelanjutan dimana salah satu dimensinya adalah tanggung

jawab sosial, dimensi yang lain adalah pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan.

Misi :

- Berkomitmen pada "Pembangunan yang Berkelanjutan".
- Adanya Kebijakan Tanggung-jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dimana sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, PT. Holcim menyadari pentingnya CSR dan bertujuan untuk menjadi yang terdepan. Kebijakan-kebijakan ini terdiri dari yang terkait dengan penelitian ini yaitu :
 - 1) Pelibatan Masyarakat
 - a. Perusahaan melakukan pendugaan terhadap kebutuhan masyarakat, mempromosikan peran serta masyarakat dan mitra kerja dengan pihak-pihak terkait di sekitar wilayah operasional perusahaan untuk memperbaiki tingkat pendidikan, kultur dan perkembangan sosial
 - b. Perusahaan mendukung peran serta karyawannya dalam menyediakan-kegiatan sosial dengan masyarakat setempat.
 - 2) Monitor dan Pelaporan Kinerja
 - a. Perusahaan mengidentifikasi dan memonitor masalah-masalah penting dari kinerja sosial perusahaan, melakukan evaluasi dari kegiatan dan program yang telah dilakukan dan menerbitkan laporan atas kinerja dan kemajuan yang terkait.
 - b. Perusahaan menargetkan laporan sosialnya agar dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.
 - c. Perusahaan mengharapkan masukan dari pihak-pihak terkait untuk kemudian dijadikan masukan untuk program-program yang akan datang.

Kegiatan CSR atau yang di PT. Holcim lebih dikenal dengan istilah Community Relations (ComRel) telah dilakukan sejak tahun 2002. Kegiatan ini dikelola oleh Divisi Community Relations yang berada di bawah kendali Direktur Operasi Pabrik Narogong. Divisi Community Relations dipimpin oleh seorang Manajer, dan 2 orang ComRel Officer.

Pembagian Tugas

Tugas Pokok Divisi Community Relations PT. Holcim Indonesia, Tbk., dapat diuraikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Uraian Tugas Pokok Pengelola ComRel

NO	Jabatan	Tugas	Lingkup Wilayah Tanggung Jawab	
1.	Manager	1.	Mengkoordinasikan kegiatan comrel dalam internal serta eksternal perusahaan	
		2.	Melaporkan semua kegiatan yang terkait dengan ComRel kepada Direktur pabrik Narogong	
2.	ComRel Officer 1	1.	Melaksanakan kebijakan yang diarahkan oleh manager	
		2.	Mewakili manager dalam melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan Pemda Kabupaten Bogor	
		3.	Menjadi pendamping desa-desa binaan	Desa Nambo, Cikahuripan dan Desa Klapanunggal
		4.	Mewakili PT. Holcim dalam Struktur Pengawas di BMT Swadaya Pribumi	
3.	ComRel Officer 2	1.	Melaksanakan kebijakan yang diarahkan oleh manager	
		2.	Menjadi pendamping desa-desa binaan	Desa Kembang Kuning, Bantarjati dan Desa Lulut

Sumber : Wawancara (diolah)

Dalam menjalankan tugasnya para pengelola program ini tidak tinggal di lokasi desa binaan. Rata-rata dalam 1 minggu mereka berada di lokasi desa sebanyak 3 hari. Terkecuali jika ada kegiatan musyawarah desa untuk perencanaan kegiatan tahunan, para petugas ini hampir setiap hari berada di lokasi. Namun hal ini tidak berlaku bagi manager program yang hanya sesekali berada di lapangan. Peran manager lebih berperan sebagai koordinator dan berada di lokasi pabrik. Namun jika ada sosialisasi kegiatan baru, misalnya penanaman pohon kihujan, maka manajer tersebut turun ke lapangan. Tapi para petugas di desa-desa tersebut tetap berkoordinasi dengan manajernya, hal ini menjadi semacam standar pelaksanaan kegiatan di divisi comrel tersebut.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, para pengelola program ini lebih sering berkoordinasi langsung dengan aparat desa daripada dengan aparat kecamatan. Pihak kecamatan hanya sebagai fasilitator saja dalam kegiatan comrel ini. Hal ini menurut penulis menjadi temuan yang menarik dalam penelitian ini, yaitu bahwa peran aparatur kecamatan tidak maksimal dalam pelaksanaan program ini. Hal ini dikuatkan dengan tidak adanya data yang lengkap tentang jumlah dana, rekap kegiatan pelaksanaan ComRel per desa dari tahun 2002-2008 yang dimiliki aparat di kecamatan.

Berkaitan dengan kinerja para pengelola program ini dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat bisa dikatakan cukup baik. Walaupun bukan berlatar belakang pendidikan pemberdayaan masyarakat (sosial), tetapi pengalaman selama menangani permasalahan di masyarakat membuat penulis yakin bahwa kinerja para pengelola memang cukup baik. Contohnya jika ada kasus yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan seperti peledakan batu kapur, petugas selalu menyiapkan alat komunikasinya selalu standby 24 jam. Prosedurnya, yaitu :

1. Masyarakat mengadu kepada salah satu petugas (tergantung wilayah binaannya, jika yang menerima bukan yang bertanggung jawab maka diupayakan untuk menghubungi petugas yang berwenang)
2. Petugas merespon pengaduan masyarakat dan sesegera mungkin jika berada di dekat lokasi segera menuju tempat yang ditunjukkan. Namun jika sedang berada jauh dari lokasi, petugas meminta petugas yang berjaga di lokasi pabrik untuk mendatangi lokasi kejadian.
3. Setelah petugas mengetahui jenis permasalahannya, maka petugas menghubungi divisi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan menanyakan apa penyebab dari permasalahan itu, berapa lama perbaikan dan apa solusi sementara yang harus diberikan kepada penduduk. Contohnya jika masalah asap/debu dari pabrik, maka yang dihubungi adalah divisi pemeliharaan.

4. Jika petugas sudah mempunyai jawaban yang cukup dari divisi yang berwenang tadi, maka segera dikomunikasikan kepada masyarakat secara jelas dan transparan supaya masyarakat tidak gelisah.

3.2.2 Program-program CSR PT. Holcim

Mengacu pada pendapat Kotler (2005) bahwa terdapat enam program CSR, yaitu :

- a. Cause Promotions, perusahaan menyediakan dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial, misalnya kampanye Bank Indonesia yang dikenal dengan kampanye 3D (dilihat, diraba, diterawang)
- b. Cause Related Marketing, perusahaan berkomitmen menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk kegiatan sosial tertentu, misalnya menyumbangkan Rp. 1.000 untuk setiap penjualan es krim merk Vienetta yang digunakan untuk korban gempa di Sumatera.
- c. Corporate Social Marketing, perusahaan mengembangkan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat untuk keselamatan dan kesehatan publik, misalnya mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap isu-isu makanan berkadar lemak rendah yang diproduksi perusahaan.
- d. Corporate Philanthropy, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu, misalnya terhadap anak-anak panti asuhan.
- e. Community Voluntering, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan atau rekan kerja untuk membantu organisasi masyarakat lokal yang menjadi sasaran program.
- f. Social Responsible Business Practice, perusahaan melakukan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

Jika mengacu pada pendapat di atas maka pelaksanaan CSR di PT. Holcim termasuk dalam program Social Responsible Business Practice dimana cirinya adalah merupakan investasi perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas khususnya dalam meningkatkan tingkat pendapatannya. Program dilaksanakan oleh PT. Holcim berkaitan dengan

pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu program ekonomi melalui BMT Swadaya Pribumi.

Pada awalnya PT. Holcim memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat untuk dijadikan modal usaha, namun pengembalian modal yang diharapkan tidak berjalan sesuai harapan sehingga perusahaan berinisiatif untuk menghentikan pola bantuan uang tunai tanpa persyaratan yang ketat tersebut dan diganti dengan model bantuan melalui pembentukan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi (SP).

1) Baitul Maal Wat Tamwil

BMT Swadaya Pribumi lahir berawal dari inisiatif PT. Holcim Indonesia Tbk, melalui Community Relations Department bekerjasama dengan para tokoh masyarakat di Kecamatan Klapanunggal mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi perusahaan. BMT Swadaya Pribumi tanggal 9 Juni 2006 dengan modal awal sebesar Rp. 201.000.000.-.

BMT Swadaya Pribumi beralamat di Ruko Rawa Jejod 2, Jl. Raya Klapanunggal – Bojong KM 1 Desa Kembang Kuning Klapanunggal

Visi : Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional, kokoh, bermanfaat dan amanah dalam menumbuhkembangkan ekonomi umat berlandaskan asas dan prinsip-prinsip dasarnya yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.

Misi :

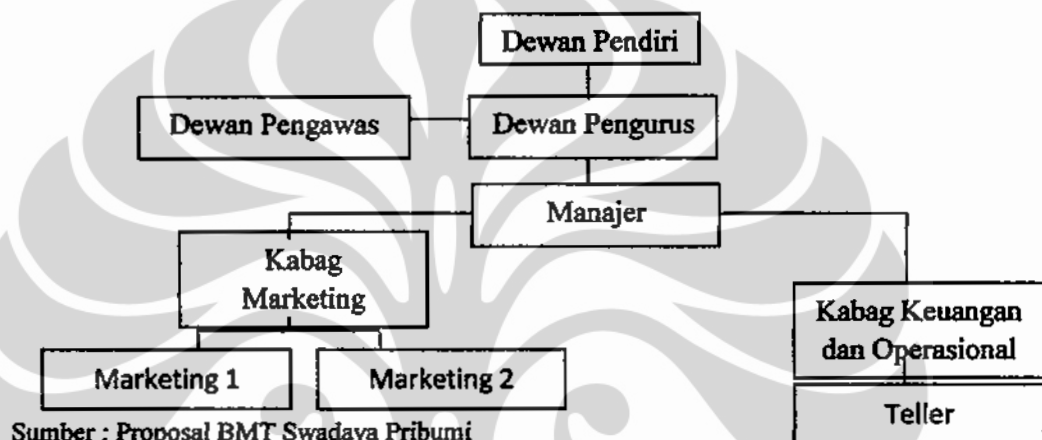
1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat khususnya ekonomi kecil.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan masyarakat.
3. Menghimpun dan mengelola dana masyarakat sehingga memiliki nilai tambah bagi orang lain.
4. Membebaskan masyarakat kecil dari riba dan rentenir

• Struktur Organisasi

Dalam organisasi BMT ini terdiri dari

1. Dewan Pendiri : terdiri dari unsur masyarakat dan PT. Holcim
2. Dewan pengawas Syariah : terdiri dari 3 orang (Syariah, manajemen dan keuangan)
3. Pengurus dan sekretaris
4. Pengelola ; terdiri dari manajer, kabag marketing, marketing sebanyak 3 orang, kabag keuangan dan operasional serta teller

Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :



Sumber : Proposal BMT Swadaya Pribumi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Swadaya Pribumi

- **Indikator Keberhasilan**

1. Pendapatan nasabah meningkat dibandingkan sebelum ikut dalam program yang digulirkan BMT
2. Volume penjualan usaha nasabah meningkat
3. Kemampuan menyekolahkan anak-anaknya menjadi lebih baik
4. Kesehatan keluarga nasabah dapat diperhatikan dengan baik

Hasil wawancara dengan pengurus BMT Swadaya Pribumi menunjukkan bahwa sejak didirikan pada tahun 2006, belum pernah dilakukan evaluasi terhadap indikator keberhasilan tersebut. Saat penulis menanyakan bagaimana cara untuk mengetahui keberhasilan BMT selama ini, manajer BMT menjawab bahwa masyarakat atau warga yang ingin mengetahui dapat langsung ke lapangan dan bertanya secara langsung dengan penerima bantuan. Hal ini menjadi poin kurang dari BMT bahwa, indikator yang ditulis dalam dokumen BMT belum pernah dilakukan evaluasi tingkat keberhasilannya.

- **Pembinaan**

1. Pembinaan dilakukan secara berkala setiap minggu dan atau setiap bulan
2. Materi pembinaan meliputi manajemen usaha sederhana serta materi peningkatan kualitas spiritual
3. Pembinaan dilakukan oleh petugas Marketing dan kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan kolektif angsuran pembiayaan
4. Pembinaan dilakukan secara berkelompok
5. Pembinaan moral dilakukan sebulan sekali per kelompok di pasar melalui program pengajian dan acara-acara seremonial lainnya yang dijadualkan oleh BMT

Fakta yang ditemui penulis di lapangan, untuk kegiatan pembinaan sudah berjalan baik. Hal ini dikarenakan dilakukan bersamaan dengan kolektif angsuran tetapi dilakukan tidak per kelompok dan waktunya singkat. Hal ini dapat dimaklumi karena waktu pembinaan biasanya dilakukan pada saat waktu berdagang atau saat melayani pelanggan.

Menurut pengamatan dan hasil wawancara dengan pengurus, masyarakat sangat mendukung adanya BMT ini, terlihat dari perkembangan jumlah nasabah yang terus berkembang. Pada awal pembentukan tahun 2006 nasabah berjumlah 511 dan bertambah menjadi sekitar 2.295 nasabah sampai dengan tahun 2008, atau terjadi kenaikan sebesar 349 %. Jumlah aset juga mengalami perkembangan yang pesat, jika pada awal pendirian mempunyai aset sebesar Rp. 360.443.929.- maka pada tahun 2008 mempunyai aset sebesar 2.509.543.441.-, atau mengalami kenaikan sebesar 596%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Perkembangan Nasabah dan Aset BMT Swadaya Pribumi Tahun 2006-2008

No	Uraian Tahun	Nasabah (Orang)	% kenaikan	Aset (Rp.)	% Kenaikan
1.	2006	511		360.443.929.-	
2.	2007	1.213	137	1.031.794.895.-	186
3.	2008	2.295	349	2.893.779.574.-	596

Sumber : Laporan Keuangan BMT Swadaya Pribumi (diolah)

Jika perkembangan nasabah diatas dilihat hanya dari nasabah yang bertempat tinggal di kecamatan Klapanunggal saja, maka selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5 Perbandingan antara nasabah BMT penduduk Klapanunggal dengan dengan total nasabah

No	Uraian	Nasabah (Orang)	Nasabah penduduk Klapanunggal (Orang)	% Dari total Nasabah
	Tahun			
1.	2006	511	400	78
2.	2007	1.213	736	61
3.	2008	2.295	1420	62

Sumber : Laporan Keuangan BMT Swadaya Pribumi (diolah)

Tabel 3.5 menjelaskan proporsi atau perbandingan nasabah BMT Swadaya Pribumi antara total nasabah dengan nasabah yang berdomisili di kecamatan Klapanunggal. Misalnya pada tahun 2006 dari 511 nasabah BMT Swadaya Pribumi, sebanyak 400 orang (78%) merupakan masyarakat Klapanunggal. Pada tahun 2007 sebanyak 61 % nasabah BMT merupakan masyarakat Klapanunggal dari total 1.213 nasabah. Sedangkan pada tahun 2008 dari 2.295 nasabah BMT Swadaya Pribumi, sebanyak 1.420 orang (62%) merupakan masyarakat Klapanunggal. Sehingga dapat disimpulkan sejak berdiri tahun 2006 rata-rata nasabah yang berdomisili di Kecamatan klapanunggal adalah sebesar 67%. Hal ini menurut penulis wajar karena letak dari BMT sendiri yang berada di Klapanunggal dan belum terlalu banyak mengembangkan promosinya ke kecamatan lain.

- **Produk Pembiayaan**

BMT Swadaya Pribumi mempunyai produk-produk pembiayaan sebagai berikut :

1. **Murabahah / Jual Beli**

Akad jual beli suatu barang dimana BMT Swadaya Pribumi (penjual) menyebutkan harga jual terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut yang disetujui oleh nasabah (pembeli). Murabahah

sangat berguna bagi nasabah yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat ia kekurangan likuiditas, maka nasabah meminta pada BMT agar membiayai pembelian barang tersebut dan nasabah membayarnya secara angsuran. Pendapatan BMT dari produk ini pada tahun 2006 sebesar Rp. 9.445.650.- dan pada akhir tahun 2008 sebesar Rp. 189.069.850.- atau terjadi peningkatan tajam sebesar 1.902% .

2. Mudharabah

Akad kerjasama usaha antara BMT dengan nasabah dimana BMT menyediakan modal (100%) sedangkan nasabah menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama berupa nisbah bagi hasil dan dituangkan dalam akad perjanjian. Jenis produk ini sangat tepat bagi nasabah yang membutuhkan modal kerja untuk pengembangan usaha perdagangan atau jasa. Pendapatan BMT dari produk mudharabah pada tahun 2006 sebesar Rp. 4.534.000.- dan pada akhir tahun 2008 sebesar Rp. 113.658.000.- atau terjadi peningkatan tajam sebesar 2.407% .

3. Ijarah (Sewa/jasa)

Akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa / jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah bisa digunakan bagi nasabah yang kekurangan dana untuk menyewa bangunan (misal ruko), biaya sekolah, biaya berobat dll yang harus dibayar secara tunai tanpa diangsur. Nasabah meminta BMT untuk membayarnya secara tunai dan nasabah tersebut mengangsurnya ke BMT Swadaya Pribumi. Prosentase kenaikan produk ijarah ini dari tahun 2006-2008 sebesar 4.348%, yaitu sebesar Rp. 1.086.000.- pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 8.309.500.- pada tahun 2008.

Pada penjelasan di atas, penulis telah menceritakan awal pembentukan BMT Swadaya pribumi ini. Jika kita ringkas, maka kontribusi PT. Holcim Indonesia dalam pembentukan BMT ini yaitu ;

- a) Menginisiasi/ pembentukan BMT Swadaya Pribumi, yang mulai beroperasi sejak bulan 9 Agustus 2006

- b) Memberikan modal kerja Rp 526 juta, dan dukungan peralatan kantor, disalurkan dalam 3 tahun anggaran Program Comrel (2006; Rp 201 juta; 2007; Rp 150 juta; 2008; Rp 175 juta)
- c) Fasilitas kantor operasional (sementara) di Masjid Al Banna
- d) Menyediakan pendamping /konsultan microfinance; BMT Center Dompot Dhuafa (2006), BMT Al Karim (2007)
- e) Koordinasi dan pemantauan secara aktif dari Community Relations Department

Sedangkan Output yang telah dihasilkan, yaitu :

- a) Mengelola total aset sebesar Rp 2,5 milyar.
 - (1) Dana dari masyarakat Rp 970.200.000.-
 - (2) Dana kontribusi PT Holcim Indonesia Tbk, Pabrik Narogong Rp 521.885.000.-
 - (3) Dana modal kerja dari BPMKS Kab. Bogor sebesar Rp 450.000.000.-
- b) Penerima manfaat langsung pembiayaan tanpa bagi hasil (Qardhul Hasan) bagi usaha mikro dhuafa dari Desa Nambo, Desa Kembangkuning, Desa Klapanunggal, Desa Bantarjati dan Desa Linggarmukti lebih dari 50 warga, dengan Total pembiayaan tidak kurang dari Rp. 39.000.000.-

3.2.3 Perkembangan Dana GMM pada BMT Swadaya Pribumi

Menurut hasil wawancara dengan manajer BMT Swadaya Pribumi, mereka baru menerima dana pada akhir tahun 2008, sedangkan pemberian kredit pada masyarakat dimulai pada tahun 2009. Selanjutnya dijelaskan bahwa sampai dengan akhir semester dua dana yang terserap sudah 100% diperuntukan bagi masyarakat di tujuh kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Jonggol, Sukamakmur, Cileungsi, Gunung Putri, Tanjungsari, Cariu dan Kecamatan Klapanunggal. Untuk Kecamatan Klapanunggal sendiri perkembangan jumlah nasabah pengguna dana GMM dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.6 Perkembangan Nasabah BMT Swadaya Pribumi dari Dana GMM
Tahun 2009

No	Desa	Bulan								
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep
1.	Kembang Kuning	9	25	50	77	104	127	119	114	119
2.	Klapanunggal	3	10	18	23	23	24	24	24	24
3.	Bantarjati	1	3	3	3	3	4	2	4	3
4.	Cikahuripan	1	2	6	9	13	13	27	13	14
5.	Nambo	-	-	5	14	17	19	7	19	20
6.	Lulut	-	-	-	1	2	1	1	1	1
	Jumlah	14	40	82	127	162	188	180	175	181

Sumber : Laporan Keuangan BMT Swadaya Pribumi Tahun 2009 (telah diolah)

Dilihat dari jenis usahanya terdiri dari berbagai jenis, misalnya usaha warung kelontong, bengkel, photocopy, pedagang stiker pinggir jalan, warung gado-gado dsb. Rata-rata besarnya pinjaman berkisar Rp. 200 ribu sampai dengan Rp. 3 juta dengan masa angsuran antara 1 bulan sampai dengan tiga bulan. Karena sistem keuangannya memakai sistem syariah, maka BMT menerapkan akad bagi hasil sekitar 1,7 % per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan perguliran dana oleh PT. Indocement kepada masyarakat di kecamatan Citeureup, dimana Bank Mandiri menerapkan bunga hanya sekitar 0,6 % per bulan bagi peminjam.

3.2.3 Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat melalui berbagai program yang dibiayai oleh APBD. Program pemberdayaan khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah guna menanggulangi kemiskinan. Salah satu program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi ini adalah Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM).

Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM) merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan demikian maka diadakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengarah pada masyarakat kecil melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah. Pola kegiatan ini adalah pemberian modal secara bergilir.

Sejak digulirkan pada Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengalokasikan dana sebesar Rp. 5.316.310.000.- bagi seuruh masyarakat di Kabupaten Bogor. Selengkapnya alokasi dana GMM dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.7 Alokasi Dana Perguliran Masyarakat dari APBD Kabupaten

Tahun	Jumlah Dana Perguliran(Rp.)	Sasaran
2005	3.545.310.000.-	3 Mediator Perguliran
2006	637.000.000.-	11 Mediator Pemandiri
2007	698.000.000.-	11 Mediator Pemandiri
2008	446.000.000.-	11 Mediator Pemandiri

Sumber : Laporan Perkembangan Kegiatan Gerakan Masyarakat Mandiri Tahun 2009

Jumlah dana perguliran masyarakat sebesar Rp. 3.545.310.000.- pada tahun 2005 diberikan pada tiga mediator perguliran yang berbentuk lembaga keuangan mikro (BMT). Alokasi dana ini diberikan sebagai modal penyertaan pemerintah daerah kepada lembaga keuangan mikro tersebut. Bentuk kerjasama dari penyertaan modal ini adalah perjanjian kerjasama antara tiga lembaga keuangan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Masa kerjasama adalah delapan tahun. Sedangkan alokasi dana tahun 2006 sampai dengan 2007 diberikan kepada 11 mediator pemandiri yang terdiri dari badan, dinas atau kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Alokasi dana ini diperuntukan untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing dinas tersebut.

Di dalam tabel di atas terlihat bahwa sasaran Program Gerakan Masyarakat Mandiri adalah mediator perguliran dan mediator pemandiri. Hal ini dimaksudkan agar proses pemberdayaan dimasyarakat dapat berjalan secara bersamaan antara lembaga keuangan mikro sebagai mediator perguliran serta perwakilan dinas, badan dan kantor sebagai mediator pemandirian. Mediator perguliran adalah lembaga keuangan mikro yang berpola syariah / bagi hasil (BH) maupun bunga konvensional (BK) yang memberikan pinjaman modal melalui mekanisme bagi hasil dan mekanisme perbankan kepada masyarakat miskin.

Sedangkan mediator pemandirian adalah mediator yang melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara melatih dan melakukan pendampingan. Mediator tersebut adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kecamatan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini mediator pemandirian bertindak sebagai pembina langsung kelompok masyarakat agar dapat memanfaatkan dana perguliran GMM seoptimal mungkin.



BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Analytical Hierarchy Process

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok dan mengaturnya ke dalam suatu hierarki. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Saaty sekitar tahun 1971-1975 (Permadi 1992).

Data primer yang diperoleh melalui kuesioner AHP diolah guna mencari nilai sintesa global dan sintesa masing-masing elemen dengan menggunakan bantuan program perangkat lunak *Expert Choice*. Perangkat lunak ini merupakan alat analisa pengambilan keputusan yang berdasarkan AHP. Perangkat lunak *Expert Choice* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Expert Choice 2000 2nd Edition*.

Menurut Khoirunnurofiq (2009), terdapat beberapa pembenaran diperlukannya metode AHP, yaitu :

1. Jika data historis atau empiris variabel yang akan diramal tidak tersedia lengkap dan berkualitas
2. Metode kualitatif hanya membutuhkan judgement, opini dan pengalaman dari yang ahli, oleh karena itu AHP dinamakan juga judgemental forecasting method
3. Metode peramalan kualitatif tidak selalu mengikuti secara kaku tahapan prosedur peramalan, tapi menyesuaikan dengan situasi dan hasilnya tidak selalu berupa besaran atau angka. Jika metode ini dipakai yang menjadi pemroses informasi bukan semata aturan dan model matematik, tapi juga imajinasi peramal.
4. Walaupun metode ini mengandung subyektivitas tinggi, ia tetap sistematis dan ilmiah. Alasannya, meski jenis metode kualitatif yang digunakan adalah sama, hasilnya antar peramal dapat berbeda tajam sehingga kurang dapat lengkap dan ternyata teknik ini banyak dipakai dan berkembang.

Dalam kasus pemberdayaan ekonomi di kecamatan Klapanunggal, metode ini dipakai karena terbatasnya data sekunder dalam artinya dalam hal kualitas dan jenis.

Dalam penerapannya, metode AHP memiliki beberapa aksioma sebagai berikut :

1. *Reciprocal Comparison*, artinya pengambil keputusan bisa membuat perbandingan elemen-elemen dari suatu kriteria alternatif dan menyatakan preferensinya. Misalnya : jika
2. *Homogenity*, artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas, dan elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain.
3. *Independence*, artinya bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif namun alternatif dipengaruhi oleh kriteria. Ini berarti pola ketergantungan adalah searah ke atas.
4. *Ekspektations*, artinya suatu hierarki diasumsikan lengkap mengikuti prinsip ekspektasi dan prinsip manusia yang menonjol daripada rasionalitasnya.

4.1.1 Tahapan-tahapan dalam metode AHP

Dalam melakukan metode ini tahap-tahap yang harus dilakukan adalah :

1. Penyusunan Hirarki (Decomposition). Tahapan ini menguraikan persoalan yang utuh ke dalam unsur-unsurnya yang homogen. Pemecahan terus dilakukan hingga tidak dapat diuraikan dan menghasilkan suatu hirerarki yang lengkap maupun tidak lengkap. Atau dengan kata lain menyusun hirarki menguraikan persoalan menjadi elompok-kelompok yang homogen, serta menguraikannya menjadi bagian yang lebih kecil.
2. Penilaian Perbandingan (Comparative Judgement). Tahapan ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu level tertentu berkaitan dengan level di atasnya. Pada tahap ini pengambil keputusan menterjemahkan seluruh persepsi dan informasi yan tersedia ke dalam perbandingan sepasang elemen dengan menggunakan skala sebagai berikut :

Tabel 4.1 Nilai Skala Perbandingan Berpasangan

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Lebih penting	A lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala missal 6 antara 5 dan 7
Resiprokal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Asumsi masuk akal

Hasilnya adalah suatu matriks pairwise comparison, dimana berlaku aksioma resiprokal, yaitu jika elemen k dinilai 5 kali lebih penting dari elemen l, maka elemen l harus sama dengan 1/5 kali lebih penting dari k

3. Sintesa Hasil (*Synthesis of Priority*). Dalam tahap ini dicari prioritas elemen pada setiap level berdasarkan matriks pairwise comparison (prioritas lokal) melalui normalisasi yang didasarkan pada konsep eigenvektor dan eigenvalue. Hasil akhir dari tahapan ini adalah prioritas global yang merupakan hasil perkalian antar prioritas lokal.
4. Logical Consistency. Tahapan ini merupakan refleksi dari aksioma homogeneity dengan prinsip transitivity. Rumus-rumus untuk melihat konsistensi ini adalah :

$$CI \text{ level} = (\lambda \text{ maks} - n) / (n - 1)$$

$$CR \text{ level} = CI / CR$$

Dimana : CI = Consistency Index

CR = Consistency Ratio

RI = Ratio index

Apabila hasilnya menunjukkan adanya inkonsistensi, maka dilakukan perbaikan konsistensi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membentuk suatu matriks yang terdiri dari rasio prioritas w_i/w_j ;

- b) w_i/w_j diperoleh dari metode eigenvektor untuk prioritas lokal
 - c) Mencari selisih absolut terbesar antara matriks pairwise dengan matriks rasio prioritas
 - d) Mengganti selisih nilai di atas dengan w_i/w_j yang relevan
5. *Sensitivities Analysis*. Analisis sensitivitas digunakan untuk melihat pengaruh dari perubahan bobot kriteria terhadap urutan prioritas kebijakan. Perubahan ini umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, misalnya situasi ekonomi politik, opini media atau informasi baru yang diperoleh.

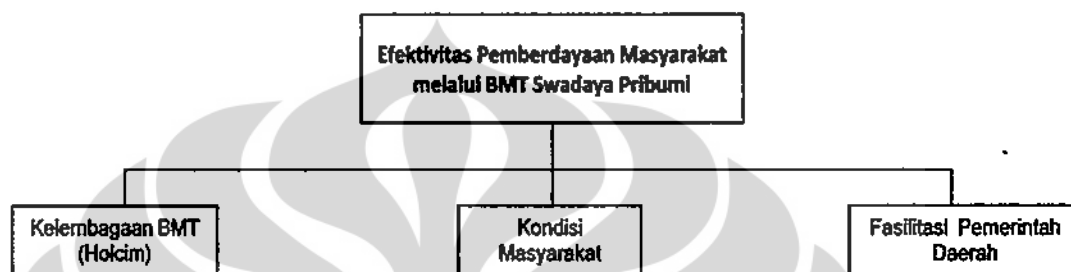
4.1.2 Penyusunan Hirarki

Berdasarkan wawancara dengan narasumber maka disusunlah hirarki AHP penelitian ini. Selain dari hasil wawancara, penyusunan hirarki juga didasarkan dari informasi data sekunder berupa buku-buku pemberdayaan masyarakat.

Struktur hirarki yang disusun dalam penelitian ini ada tiga level yaitu:

1. Level Pertama merupakan Fokus (Tujuan Utama/*Goal*)
 Pada level ini terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini yaitu efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi. Hal ini menjadi tujuan penelitian karena hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi tidak terdokumentasi dengan baik. Hasil wawancara juga memperkuat hal ini, dimana selama BMT berdiri proses pemberdayaan belum dievaluasi oleh pengurus dan pengawas BMT. Hal ini belum menjadi fokus BMT karena mereka lebih fokus terhadap penyerapan dana masyarakat dan tingkat pengembalian.
2. Level Kedua merupakan Kriteria
 Pada level ini dimasukan kriteria-kriteria yang menurut penulis dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kriteria ini didapat dari hasil wawancara terhadap responden yang dianggap ahli dalam masalah pemberdayaan serta berdasarkan beberapa referensi yang dijelaskan pada bab tinjauan pustaka. Dalam melihat efektivitas suatu proses pemberdayaan masyarakat, kondisi penerima manfaat atau masyarakat, peran stakeholder yang terlibat, dan

tatanan kelembagaan yang mengatur hubungan antar pelaku merupakan aspek yang menonjol untuk diukur. Berdasarkan hal tersebut maka kriteria yang akan diukur dalam penelitian ini mencakup kelembagaan BMT (Holcim), kondisi masyarakat dan fasilitasi pemerintah daerah sebagai stakeholder yang paling berperan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini.

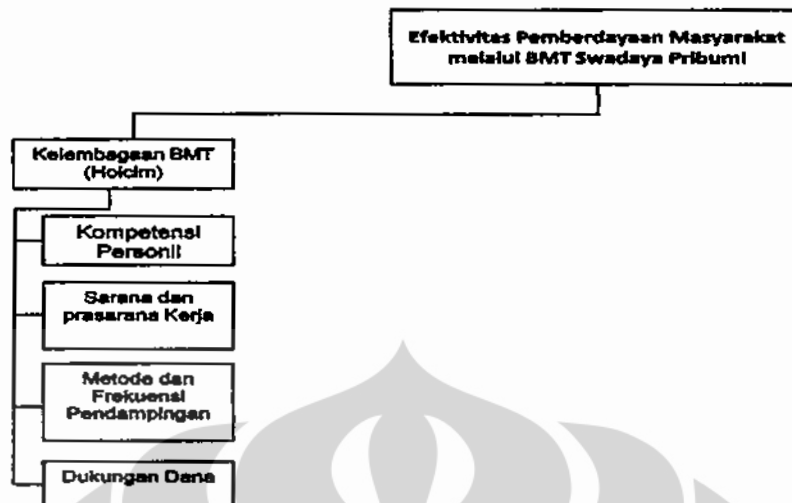


Gambar 4.1 Kriteria-kriteria dalam mencapai Tujuan Penelitian

3. Level Ketiga merupakan Sub Kriteria

a. Sub Kriteria dalam Kelembagaan BMT (Holcim)

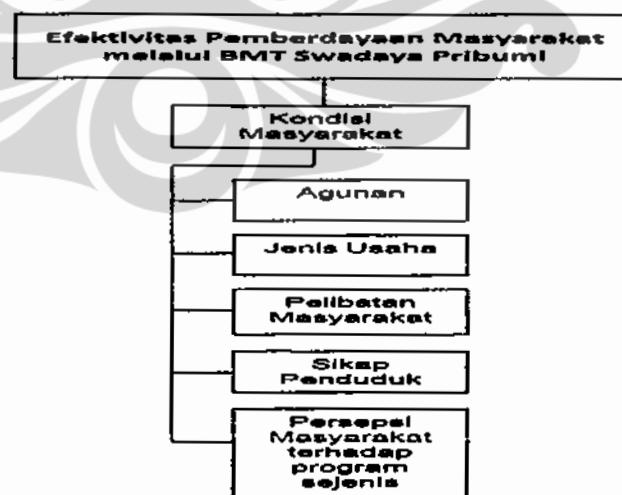
Pada kriteria pertama yaitu kelembagaan BMT (Holcim) terdapat empat sub kriteria yang menjadi kendala dalam kelembagaan yaitu kompetensi personil, sarana dan prasarana kerja, metode dan frekuensi pendampingan dan dukungan dana. Sub kriteria ini merupakan intisari dari wawancara terhadap responden terutama terhadap pengurus BMT dan pengawas yang merupakan perwakilan PT. Holcim di BMT serta referensi dalam bab II dimana kompetensi atau kemampuan tenaga pendamping atau *community worker* diharuskan serba bisa dan cepat beradaptasi pada berbagai basis pekerjaan yang berbeda. Terkait dengan metode juga pemberdayaan dimana perlunya pendekatan antar tim dalam pengembangan serta pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal serta ditujukan untuk benar-benar ingin mengembangkan masyarakat yang ada, bukan sekedar memperkenalkan ataupun membawa teknologi yang baru kepada masyarakat. Selengkapnya hirarki sub kriteria pada kelembagaan dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini :



Gambar 4.2 Sub Kriteria dalam Kelembagaan BMT (Holcim)

b. Sub Kriteria dalam Kondisi Masyarakat

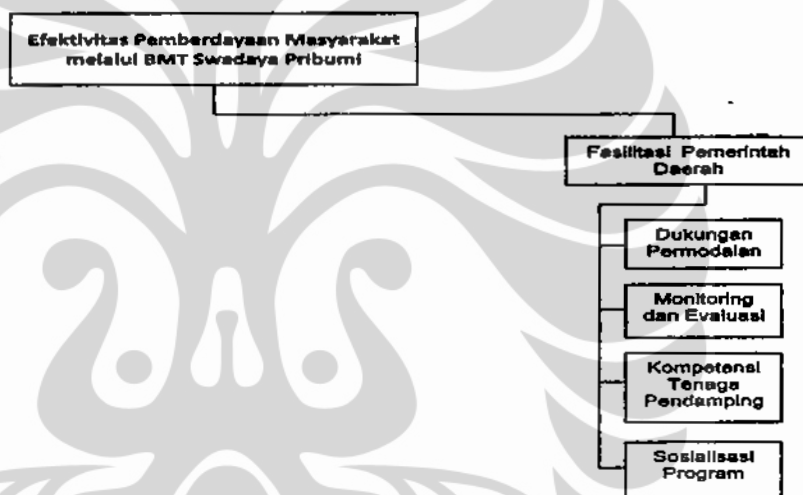
Sub kriteria dalam kondisi masyarakat diperoleh dari wawancara dan observasi penulis di lapangan serta referensi pada bab tinjauan pustaka dimana pelibatan masyarakat mencakup kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Dari proses tersebut didapat beberapa sub-sub kriteria yang kemudian dimasukkan dalam hirarki, yaitu agunan, jenis usaha, pelibatan masyarakat, sikap penduduk, persepsi masyarakat terhadap program sejenis. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini.



Gambar 4.3 Sub Kriteria dalam Kondisi Masyarakat

c. Sub Kriteria dalam Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pada kriteria ketiga yaitu fasilitasi pemerintah daerah terdapat empat sub kriteria yang menjadi kendala yaitu dukungan permodalan, monitoring dan evaluasi, kompetensi tenaga pendamping dan sosialisasi program. Sub kriteria ini didapat dari hasil wawancara responden serta referensi pada bab terdahulu dimana salah satu strategi yang diambil dalam upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengoptimalkan pemberdayaan melalui upaya mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan pendapatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.



Gambar 4.4 Sub Kriteria Fasilitasi Pemerintah Daerah

4.1.3 Penjelasan Kriteria dan Sub Kriteria dalam Hirarki

Dalam level 1, sasaran hirarki secara umum adalah permasalahan dalam pemberdayaan ekonomi melalui BMT Swadaya Pribumi. Berbagai kriteria utama untuk memecahkan masalah tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden, studi literatur mengenai lembaga keuangan mikro serta pengamatan penulis. Kriteria-kriteria tersebut adalah :

1. Kriteria Kelembagaan BMT (Holcim)

Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah kondisi yang ada dalam BMT baik mengenai personil, operasional kantor dan modal.

Kelembagaan BMT (Holcim) diwakili oleh sub kriteria di bawah ini, yaitu :

a. **Kompetensi Personil**

Kompetensi personil adalah kemampuan diri yang dimiliki oleh personil BMT dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kemampuan di sini berarti potensi personil yang dapat diperoleh dari latar belakang pendidikan atau pengalaman berorganisasi.

b. **Sarana dan Prasarana Kerja**

Sarana dan prasarana kerja adalah segala sesuatu yang dapat melancarkan kerja BMT tersebut. Misalnya berupa peralatan kantor (gedung, komputer, Meja kursi, lemari, AC, printer, motor) atau dapat berupa kondisi lingkungan BMT yang dapat mendukung kerja BMT tersebut.

c. **Metode dan Frekuensi Pendampingan**

Metode adalah cara atau alat yang dipakai dalam melakukan pemberdayaan, sedangkan frekuensi adalah berapa kali jumlah pendampingan yang dilakukan dalam satu waktu tertentu.

d. **Dukungan Dana**

Dukungan dana adalah bantuan keuangan yang dilakukan oleh PT. Holcim dan pemrakarsa lainnya sebagai pendiri BMT.

2. Kriteria Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat adalah gambaran / potret keadaan dan kemampuan masyarakat terkait program pengaliran dana lewat BMT. Kondisi masyarakat diwakili oleh sub kriteria di bawah ini, yaitu :

a. **Agunan**

Agunan adalah jaminan yang harus disediakan oleh masyarakat sebagai peminjam. Biasanya agunan berupa surat kepemilikan kendaraan bermotor (roda 2 atau 4), surat kepemilikan tanah (sertifikat).

b. **Jenis Usaha**

Jenis Usaha adalah macam-macam kegiatan yang dapat diajukan untuk mendapat kredit dari BMT, seperti tukang gado-gado, warung makan, catering, bengkel dll.

c. **Sikap Penduduk**

Sikap penduduk adalah kecenderungan masyarakat untuk tidak mau berkelompok / individualistis dalam menjalankan usahanya.

d. Persepsi masyarakat terhadap program sejenis

Persepsi atau pandangan masyarakat terhadap program sejenis maksudnya adalah, masyarakat sudah terbiasa mendapatkan dana hibah yang tidak perlu ada pengembalian dana.

3. Kriteria Fasilitasi Pemerintah Daerah

Fasilitasi pemerintah adalah peran atau dukungan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat

Fasilitasi pemerintah Daerah diwakili oleh sub kriteria di bawah ini, yaitu :

a. Dukungan Permodalan

Dukungan permodalan adalah bantuan alokasi dana yang diberikan pada BMT Swadaya Pribumi yang berasal dari dana APBD Kabupaten. Sifat dari bantuan dana ini adalah penyertaan modal pada BMT selama jangka waktu 8 tahun.

b. Monitoring dan Evaluasi

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan menilai perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah.

c. Kompetensi Tenaga Pendamping

Kompetensi tenaga pendamping adalah kemampuan dan keahlian tenaga pendamping dalam hal pemberdayaan masyarakat.

d. Sosialisasi Program

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyebarluaskan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kepada pemangku kepentingan (Dinas, Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan masyarakat, perguruan tinggi).

4.1.4 Kelebihan dan Kelemahan metode AHP

AHP dapat memecahkan masalah yang kompleks sehingga kriteria yang diambil cukup banyak. Keunggulan metode AHP jika dibandingkan dengan metode lain adalah (Franklin dan Hui, 2004):

1. Struktur yang berhirarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam dan juga alternatif-alternatif yang ada.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan.
3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambil keputusan.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Permadi yang menyebutkan bahwa keunggulan model AHP dibandingkan model lain, yaitu :

1. Suatu model keputusan yang komprehensif yang memperhitungkan hal-hal kuantitatif dan kualitatif sekaligus
2. Dapat memecahkan masalah yang multiobyek dan multikriteria (model lain; linear program) hanya dapat memecahkan single obyek dengan multikriteria.
3. Mempunyai model yang fleksibel dalam pembuatan hirarkinya

Sedangkan kelemahan metode AHP antara lain (Permadi:1992):

1. Sangat tergantung pada input berupa persepsi manusia (ekspert), sehingga jika ekspert memberikan penilaian yang keliru model yang dibangun menjadi tidak berguna.
2. Tidak adanya standar/batasan untuk menentukan tingkat ekspert seseorang, sehingga orang meragukan apakah persepsi orang tersebut dapat mewakili pendapat secara umum.
3. Bentuknya yang sangat sederhana, sehingga banyak yang meragukan dapat dipakai untuk pengambil keputusan terutama yang terbiasa menggunakan model kuantitatif yang rumit.

Untuk mengatasi kelemahan model ini salah satunya diberi alternatif kriteria ekspert yang dipakai. Misalnya orang tersebut memang dikenal mendalami dan ahli dalam bidang tersebut oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat. Untuk poin kedua, selain kelemahan hal ini juga merupakan kelebihan karena untuk para pengambil keputusan yang biasanya orang-orang yang sibuk dengan melihat model AHP ini menjadi lebih cepat mengerti dan mudah dilakukan simulasi jika ada perubahan pada salah satu elemennya dengan menggunakan analisa sensitivitas.

Pendekatan AHP, diharapkan dapat membantu menganalisa konsep pemberdayaan yang efektif melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal sehingga penilaian ekspert mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan bisa membantu memecahkan masalah yang terjadi saat ini.

4.2 Deskripsi Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, terbagi dalam dua kelompok yaitu :

1. Responden yang dilibatkan dalam menggali informasi lebih dalam (*in depth Interview*) tentang permasalahan pemberdayaan masyarakat sebanyak lima orang, terdiri dari:
 - a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
 - b. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor
 - c. Unsur PT. Holcim yang ditempatkan sebagai pengawas pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Swadaya Pribumi
 - d. Manajer BMT Swadaya Pribumi
 - e. Sekretaris Kecamatan Klapanunggal

Kelompok responden ini juga diminta untuk mengisi kuesioner untuk memilih faktor-faktor yang menjadi kendala pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di kecamatan Klapanunggal.

2. Responden yang dilibatkan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan masyarakat penerima bantuan kredit dari BMT Swadaya Pribumi sebanyak 10 orang, terdiri dari :
 - a. Manajer Community Relations PT. Holcim
 - b. Masyarakat penerima manfaat kredit bantuan melalui BMT (penulis memilih sembilan orang yang mewakili desa-desa yang ada di kecamatan Klapanunggal)

4.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam analisa penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari:

a. Data Primer, diperoleh dari:

Melalui observasi, wawancara ataupun pertanyaan kepada pihak yang berwenang, dengan menggunakan daftar pertanyaan maupun peralatan kuesioner untuk analisa AHP. Data-data tersebut diperoleh antara lain dari :

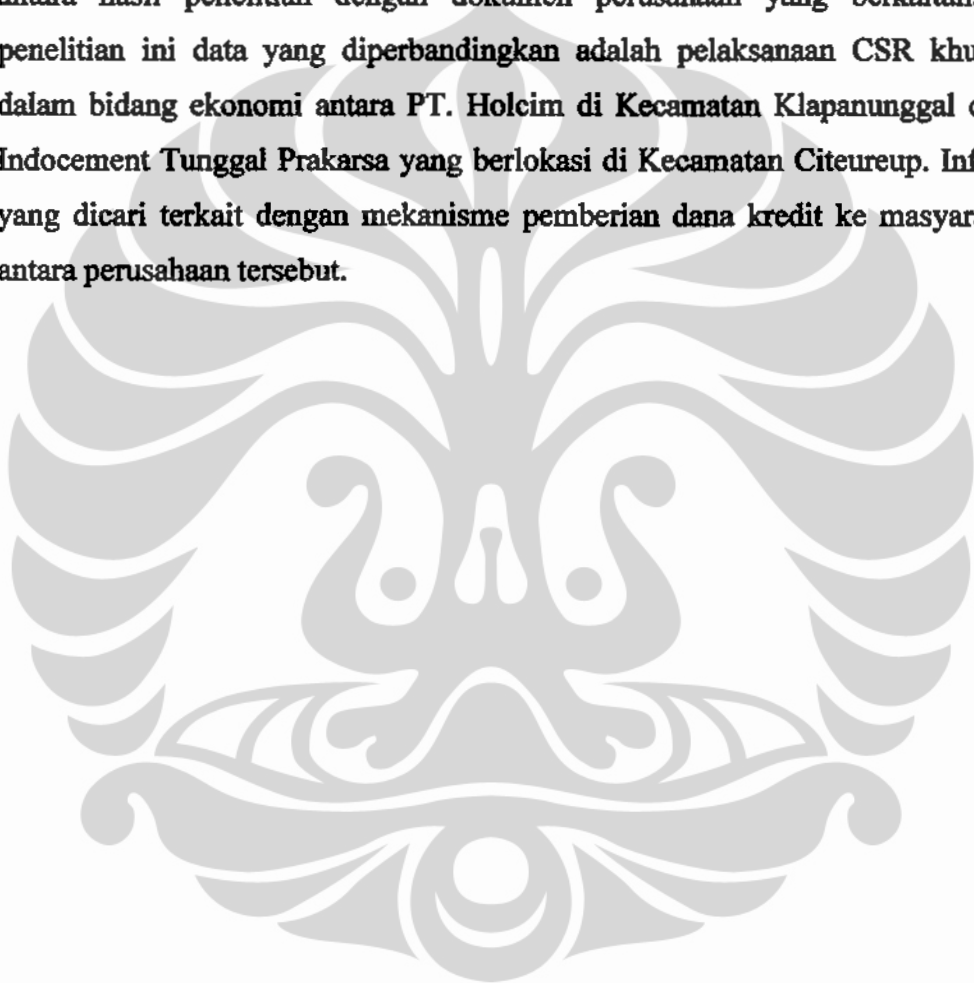
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor
- 3) PT. Holcim
- 4) BMT Swadaya Pribumi
- 5) Kecamatan Klapanunggal

b. Data Sekunder, terdiri dari :

- 1) Laporan Keberlanjutan PT. Holcim tahun 2006 – 2008
- 2) Laporan CSR PT. Holcim tahun 2008
- 3) Laporan Keuangan BMT Swadaya Pribumi tahun 2006-2008
- 4) Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Mandiri GMM)
- 5) Profil kecamatan Klapanunggal tahun 2008
- 6) Buku-buku, literatur dan bahan tulis lainnya sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan tesis.
- 7) Studi lapangan yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a) Observasi, yaitu mengamati langsung ke obyek penelitian di PT. Holcim Indonesia, Tbk. sebagai pengelola program ComRel dan di desa-desa guna melihat situasi dan kondisi serta mencatat data-data yang diperlukan berkaitan dengan bahasan penelitian.
 - b) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah dibuat untuk memperoleh jawaban atau data yang ada kaitannya dengan tujuan penelitian.

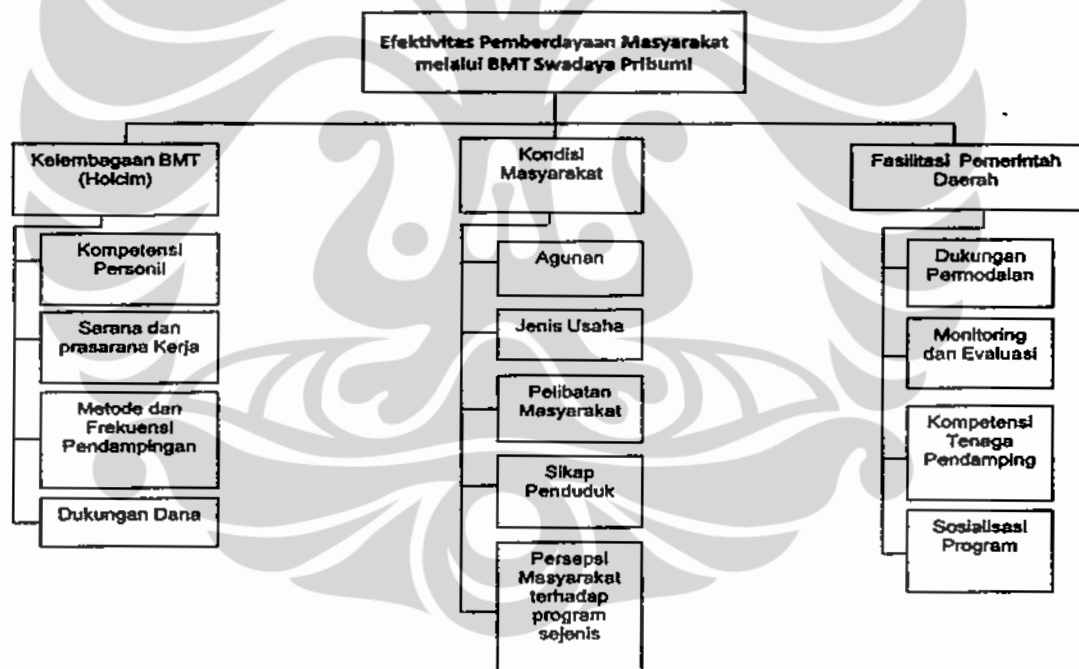
4.4 Validitas Data

Untuk memperoleh kebenaran, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Patton, triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 1990: 178). Triangulasi data dari penelitian ini diperoleh dengan meng-*cross check* informasi antara hasil penelitian dengan dokumen perusahaan yang berkaitan. Pada penelitian ini data yang diperbandingkan adalah pelaksanaan CSR khususnya dalam bidang ekonomi antara PT. Holcim di Kecamatan Klapanunggal dan PT Indocement Tungal Prakarsa yang berlokasi di Kecamatan Citeureup. Informasi yang dicari terkait dengan mekanisme pemberian dana kredit ke masyarakat di antara perusahaan tersebut.



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dan berbagai tinjauan pustaka yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, pada bagian ini akan dijelaskan permasalahan utama pemberdayaan masyarakat khususnya yang dilaksanakan melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal. Alat analisis yang dipakai menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hasil dari wawancara dengan responden, penulis membuat hirarki permasalahan dan selanjutnya responden diminta mengisi kuesioner AHP (kuesioner lengkap dilampirkan pada penelitian ini). Hirarki lengkap disajikan pada gambar 5.1 dibawah ini :



Gambar 5.1 Hirarki Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BMT Swadaya Pribumi

Selanjutnya hasil kuesioner dari para responden tersebut diolah dengan perangkat lunak *expert choice*, seperti dijelaskan di bawah ini. Proses pengisian kuesioner dilakukan secara terpisah untuk memberi keleluasaan dalam mengisi kuesioner tersebut.

5.1 Masalah Utama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

Pengolahan data dengan memakai perangkat lunak *expert choice* menunjukkan bahwa masalah utama dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi pada level kriteria adalah Kondisi Masyarakat, selanjutnya Kelembagaan BMT (Holcim) dan terakhir Fasilitasi Pemerintah Daerah. Pemilihan kriteria tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang penulis anggap ahli dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Mereka adalah lima orang yang menjadi responden dan terakhir dimatangkan kembali dengan salah seorang responden yaitu Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bappeda Kabupaten Bogor. Selama ini beliau banyak terlibat menangani program-program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat seperti program Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM), dan Imbal Swadaya. Sedangkan untuk responden untuk pengisian kuesioner terdiri dari lima orang yang penulis anggap ahli dan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi, yaitu Manager BMT, Pengawas BMT dari unsur PT. Holcim, Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Sekretaris Kecamatan Klapanunggal dan Kasubid Pertanian pada Bappeda. Hasil pengolahan data selengkapnya ditunjukkan pada tabel 5.1. dibawah ini.

Tabel 5.1. Hasil Sintesa Lokal Kriteria dan Sub Kriteria Terhadap Identifikasi Masalah Utama Pemberdayaan Masyarakat Melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor

No.	Kriteria	Hasil Sintesa Lokal
1	Kondisi Masyarakat	0,546
	Pelibatan Masyarakat	0,557
	Agunan	0,161
	Jenis Usaha	0,127
	Sikap Penduduk	0,085
	Persepsi Masyarakat terhadap program Sejenis	0,070
2	Kelembagaan BMT (Holcim)	0,325
	Dukungan Dana	0,427
	Kompetensi Personil	0,323
	Sarana dan Prasarana Kerja	0,116
	Metode dan Frekuensi Pendampingan	0,114
3	Fasilitasi Pemerintah Daerah	0,129
	Dukungan Permodalan	0,348
	Monitoring dan Evaluasi	0,311
	Kompetensi Tenaga Pendamping	0,195
	Sosialisasi Program	0,147

Selanjutnya hasil sintesa sub kriteria terhadap goal (tujuan) yang mencerminkan prioritas terhadap masalah pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor menghasilkan lima masalah utama yaitu pelibatan masyarakat, dukungan dana (dari PT. Holcim) kompetensi personil untuk menjadi tenaga pendamping, agunan, dan jenis usaha. Hasil lengkap dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2 Hasil Sintesa Sub Kriteria terhadap Identifikasi Masalah Utama Pemberdayaan Masyarakat Melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor

No.	Sub Kriteria	Hasil Sintesa Global
1	Pelibatan Masyarakat	0,304
2	Dukungan Dana	0,139
3	Kompetensi Personil	0,111
4	Agunan	0,088
5	Jenis Usaha	0,069
6	Sikap Penduduk	0,046
7	Dukungan Permodalan	0,045
8	Monitoring dan Evaluasi	0,040
9	Sarana dan Prasarana Kerja	0,038
10	Persepsi Masyarakat terhadap Program Sejenis	0,038
11	Metode dan Frekuensi Pendampingan	0,037
12	Kompetensi Tenaga Pendamping	0,025
13	Sosialisasi Program	0,019

Sebagai keterangan, tingkat inkonsistensi data pada level kriteria maupun sub kriteria masih dalam batas yang dibolehkan, yaitu dibawah 10 % (Permadi, 1992). Artinya jika melebihi angka 10% tersebut, diperlukan adanya revisi penilaian karena tingkat inkonsistensi yang terlalu besar dapat mengarah pada suatu kesalahan. Selengkapnya hasil pengolahan data dengan perangkat lunak Expert Choice 2000 2nd Edition dapat dilihat pada lampiran.

a. Kondisi Masyarakat

Pelibatan masyarakat merupakan prioritas utama dalam kriteria kondisi masyarakat yang harus ditangani. Fakta di lapangan yang di dapat penulis

menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat untuk program ini hanya sekedar untuk penyaluran dana saja. Proses pelibatan masyarakat dalam konteks untuk pemberdayaan dengan tujuan menjadi lebih mandiri tidak terlihat. Menurut referensi yang penulis gunakan pada penelitian ini diperlukan kerjasama dan kreativitas masyarakat ataupun kelompok dalam masyarakat tersebut supaya proses pemberdayaan berjalan baik. Namun fakta di lapangan masyarakat diperlakukan sama seperti nasabah biasa umumnya. Hal ini dikarenakan peran BMT sendiri lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan yang tujuan utamanya menyalurkan dana saja. Penulis berpendapat bahwa pemerintah sebagai fasilitator mestinya harus mengawasi dan mendampingi saat BMT menyalurkan kreditnya pada masyarakat. Walaupun kewenangan untuk penyaluran kredit berada pada pihak BMT tapi pemerintah daerah berhak untuk mengawasi prosesnya.

Agunan merupakan urutan kedua yang menjadi prioritas penanganan. Penulis melihat bahwa agunan ini masih menjadi masalah dalam pengajuan kredit pada BMT. Dari hasil wawancara dengan pengurus BMT diketahui bahwa yang dapat menjadi agunan bagi penjaminan kredit misalnya BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan surat keterangan kepemilikan kebun. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa tidak banyak masyarakat miskin yang mempunyai kendaraan bermotor, tanah dan kebun yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan kredit.

Jenis usaha adalah salah satu kriteria yang dipersyaratkan dalam pengajuan kredit. Menurut pengurus BMT Swadaya Pribumi tidak semua jenis usaha dapat diajukan pengajuan kreditnya. Hanya jenis usaha yang layak menurut BMT-lah yang bisa mendapatkan kredit. Keputusan layak tidaknya jenis usaha tersebut ditentukan secara bertahap oleh marketing, kemudian dibahas oleh komite pembiayaan dan terakhir diambil keputusan oleh manager. (Alur selengkapnya dapat dilihat pada lampiran).

Sikap penduduk di sini berarti adanya kecenderungan masyarakat untuk tidak mau berkelompok dalam menjalankan usahanya. Menurut pengurus BMT Swadaya Pribumi, masyarakat Klapanunggal cenderung individualistis dan

enggan untuk berkelompok dalam menjalankan usahanya. Mereka lebih suka sendiri-sendiri dengan asumsi bahwa jika mendapat keuntungan bisa langsung dirasakan. Hal ini menjadi kendala karena dalam program Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM), sasaran program ini adalah kelompok masyarakat. Sebagai penjelasan tambahan bahwa salah satu dukungan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan masyarakat adalah dukungan penyertaan modal melalui program GMM.

Persepsi masyarakat terhadap program sejenis menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui BMT. Pelaksanaan program dana perguliran yang hampir sejenis dalam komunitas yang sama ternyata mengakibatkan dampak yang tidak baik di masyarakat sendiri. Sebagai contoh di Kabupaten Bogor ada beberapa program perguliran dana yang hampir mirip dengan sumber dana yang berbeda, yaitu program GMM yang bersumber dana APBD Kabupaten dan program Raksa Desa yang bersumber dana dari Provinsi. Di kecamatan Klapanunggal kedua program ini sama-sama sedang berjalan dan sama-sama peruntukannya untuk perguliran dana, hanya perbedaannya dana Raksa Desa merupakan dana hibah sehingga tidak perlu ada pengembalian sedangkan dana GMM merupakan dana kredit yang mesti dikembalikan. Hal ini menurut pengelola BMT menjadi salah satu kendala di lapangan saat penagihan pada anggota masyarakat yang macet tagihannya.

b. Kelembagaan BMT (Holcim)

Dukungan dana menjadi masalah utama dalam kriteria kelembagaan BMT. Sejak awal pendirian pada tahun 2006, secara bertahap PT. Holcim menyalurkan dana sebesar Rp. 526.100.000.-. Jumlah aset yang dimiliki oleh BMT sampai dengan akhir tahun 2008 sebesar Rp. 2,5 Milyar. Hasil wawancara dengan manajer BMT menyebutkan bahwa jika dilihat dari jumlah penduduk yang harus dilayani, jumlah aset sebesar Rp. 2,5 Milyar pun belum mampu menjangkau penduduk Klapanunggal yang ingin mempunyai usaha. Contoh perhitungan sederhana dari total penduduk miskin Kecamatan Klapanunggal sebanyak 23.739 orang. Jika aset sebesar Rp. 2,5 milyar ini dijadikan dana perguliran masing-masing Rp. 1 juta per orang, maka hanya mampu melayani sebanyak 2.500

penduduk miskin (10%). Cakupan ini dinilai masih jauh jika ingin melayani seluruh penduduk miskin

Kompetensi personil yang dimiliki oleh BMT saat ini terutama yang berkaitan dengan pendampingan masyarakat sebagian besar berlatar belakang SMA, Sarjana Ekonomi Islam dan Sarjana Teknik. Hanya manajer BMT yang sudah mendapatkan pelatihan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini menurut penulis menjadi masalah yang mesti diperhatikan oleh BMT atau juga PT. Holcim untuk lebih memperhatikan kompetensi personil yang berkaitan dengan pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan referensi yang penulis gunakan bahwa pada proses pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya tenaga pendamping (*community worker*) yang serba bisa dan mampu memahami pola budaya masyarakat lokal. Selanjutnya peran *community worker* diharapkan dapat menjadi motor percepat perubahan, pembangkit semangat dan sebagai pendidik.

Sub kriteria yang ketiga pada kelembagaan adalah sarana dan prasarana kerja, yaitu perlengkapan dan peralatan kerja yang menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, misalnya motor sebagai alat transportasi leaflet dan brosur sebagai penunjang pendampingan, gedung yang memadai sebagai tempat operasional. Fakta di lapangan, penulis melihat bahwa untuk gedung dan alat transportasi sudah tersedia dan layak digunakan. Namun dilihat dari luas wilayah operasional dan kondisi geografisnya, jumlah tenaga pendamping masih dirasa kurang. Menurut pengurus BMT, tahun depan tenaga pendamping masyarakat akan diusahakan ditambah satu orang untuk memperlancar kegiatan BMT.

Metode dan frekuensi pendampingan yang dilakukan selama ini melalui peran marketing yang juga sebagai pendamping masyarakat. Fungsi marketing di sini adalah melakukan pembinaan sekaligus menagih jika ada nasabah yang akan melakukan pembayaran cicilan kreditnya. Frekuensi pendampingan menurut manajer BMT dilakukan minimal tiga kali seminggu. Dari pengamatan penulis metode yang digunakan hanya sebatas wawancara biasa yang menanyakan kendala yang dihadapi secara sepiantas. Penulis berpendapat bahwa metode yang lebih optimal ialah memperbanyak pertemuan kelompok dengan frekuensi yang

lebih banyak dan memakai format kendali perkembangan usaha kelompok masyarakat. Menurut referensi yang penulis gunakan pada bab II, ada metode atau teknik untuk mendekati masyarakat yang sesuai dengan karakteristik negara berkembang yaitu teknik *persuasion* dimana untuk merubah perilaku orang diperlukan teknik pendekatan dan tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat serta teknik *compulsion* artinya mengubah terlebih dahulu tindakan orang seorang atau sekelompok orang walaupun sebenarnya mereka belum menyetujui sepenuhnya apa yang dianjurkan.

c. Fasilitasi Pemerintah Daerah

Fasilitasi pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan dukungan permodalan merupakan prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan. Terbatasnya kemampuan anggaran selalu dijadikan alasan belum optimalnya alokasi untuk pemberdayaan ekonomi ini. Khusus untuk BMT Swadaya Pribumi, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan dana sebesar Rp. 450 juta. Namun masalahnya jumlah tersebut harus dialokasikan ke masyarakat yang ada di wilayah timur Kabupaten Bogor yang terdiri dari enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Jonggol, Cileungsi, Gunung putri, Sukamakmur, Tanjungsari dan Kecamatan Klapanunggal sendiri. Dukungan permodalan ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan BMT Swadaya Pribumi tentang penyaluran dana kredit program Gerakan Masyarakat Mandiri Ruang lingkup kerjasama ini mencakup antara lain : Penyaluran Dana kredit, pembinaan terhadap masyarakat penerima dana kredit, pengembalian dana kredit dan penetapan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana kredit. Dalam penyaluran kredit tersebut. Beberapa Dinas dan Badan dalam lingkup pemerintah daerah berperan sebagai mediator pemandirian, yaitu mediator yang melakukan pendampingan. Mediator tersebut adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Bidang Sosial pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kantor Koperasi dan UKM, Kecamatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditunjuk oleh

Pemerintah Kabupaten Bogor. Dibawah ini penulis mencoba menyajikan tabel kegiatan pemberdayaan yang menjadi mediator pemandirian.

Tabel 5.3 Kegiatan Badan dan Dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai Mediator Pemandirian dalam Program GMM

No	Nama Badan / Dinas / Kantor	Jenis Kegiatan
1.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	*) Pendampingan pada proses pemandirian masyarakat khususnya dalam pemandirian ekonomi dan kelembagaan
2.	Dinas Peternakan dan Perikanan	*) Pelatihan tentang pemeliharaan hewan ternak dan perikanan
3.	Kantor Koperasi dan UKM	*) Pelatihan administrasi bagi pengurus koperasi bagi pemuda
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	*) Pelatihan perbengkelan bagi pemuda, pelatihan menjahit bagi ibu-ibu

Sumber : Petunjuk Teknis Gerakan Masyarakat mandiri (diolah)

Monitoring dan Evaluasi merupakan prioritas kedua yang mesti diperhatikan dalam kriteria fasilitasi pemerintah daerah. Kendala yang ada dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama ini adalah adanya benturan waktu antar program yang ada dan jumlah pegawai yang harus melakukan kegiatan monev terbatas. Sehingga kegiatan ini kadang tidak dilakukan atau hanya mengandalkan laporan dari kelompok masyarakat penerima bantuan dan lembaga mediator perguliran. Pengertian benturan antar program adalah adanya program yang hampir sejenis yang juga memerlukan kegiatan monitoring ke lapangan. Kendala tenaga yang terbatas mengakibatkan pelaksanaan monitoring menjadi tidak optimal karena seringkali dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan. Misalnya dalam anggaran disediakan untuk tiga kali monitoring dalam satu tahun tapi karena terbatasnya tenaga hanya dilaksanakan dua kali atau bahkan hanya sekali dalam setahun. Hal inilah yang mengakibatkan keluaran dari kegiatan pemberdayaan di lapangan tidak terpantau dengan baik.

Kompetensi Tenaga Pendamping merupakan prioritas ketiga yang mesti ditangani dalam kriteria fasilitasi pemerintah. Kondisi tenaga pendamping yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor saat ini melekat fungsinya pada staf di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, khususnya pada bidang

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. Hasil wawancara dengan salah seorang staf di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, diketahui bahwa latar belakang pendidikan dari para staf yang ada belum ada yang berpendidikan khusus tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemahaman tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih ditekankan pada pembelajaran sambil berjalan (*learning by doing*). Belum ada perencanaan tentang pemberian keahlian khusus melalui pendidikan dan pelatihan bagi para staf tersebut untuk meningkatkan kemampuan di bidang pemberdayaan ekonomi. Hal ini sesuai dengan referensi yang penulis gunakan bahwa pada proses pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya tenaga pendamping (*community worker*) yang serba bisa dan mampu memahami pola budaya masyarakat lokal. Selanjutnya peran *community worker* diharapkan dapat menjadi motor pemercepat perubahan, pembangkit semangat dan sebagai pendidik. Peran tenaga pendamping di pemerintah daerah diperkuat oleh kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait. Hal ini disebabkan karena fungsinya lebih kearah fasilitasi daripada terjun langsung ke masyarakat.

Sosialisasi Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dianggarkan dalam kegiatan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan melalui Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM). Namun hasil wawancara dengan pengurus BMT Swadaya Pribumi menyebutkan bahwa BMT tersebut mengetahui informasi adanya pinjaman dana kredit melalui program GMM tersebut bukan dari kegiatan sosialisasi melainkan dari informasi anggota legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran sosialisasi masih belum fokus dan setelah dikonfirmasi kepada BPMPD jawaban yang diperoleh ternyata terkendala anggaran yang ada.

5.2 Gambaran Persepsi Responden

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penulis menggunakan lima responden yang dianggap ahli dalam pemberdayaan. Pada bagian ini penulis mencoba menggambarkan analisa per responden dari setiap kriteria dan sub kriteria yang dinilai. Hasil akhir AHP dengan Lima Ekspert responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini :

Tabel 5.4 Hasil Akhir AHP dengan Lima Expert

Prioritas	Sintesa per Elemen dari Setiap Responden Expert				
	A	B	C	D	E
Goal terhadap					
Fasilitasi Pemerintahan Daerah	0,081	0,105	0,081	0,088	0,258
Kelembagaan BMT (Holcim)	0,188	0,637	0,188	0,669	0,105
Kondisi Masyarakat	0,731	0,258	0,731	0,243	0,637
<i>Inconsistency</i>	<i>0,06</i>	<i>0,04</i>	<i>0,06</i>	<i>0,01</i>	<i>0,04</i>
<i>Kriteria Fasilitasi Pemerintahan Daerah</i>					
Dukungan Permodalan	0,500	0,177	0,625	0,048	0,625
Kompetensi Tenaga Pendamping	0,167	0,196	0,125	0,165	0,125
Monitoring dan Evaluasi	0,167	0,577	0,125	0,621	0,125
Sosialisasi Program	0,167	0,050	0,125	0,165	0,125
<i>Inconsistency</i>	<i>0,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>
<i>Kriteria Kelembagaan BMT (Holcim)</i>					
Kompetensi Personil	0,522	0,210	0,538	0,235	0,134
Sarana dan Prasarana Kerja	0,078	0,528	0,078	0,063	0,040
Metode dan Frekuensi Pendampingan	0,200	0,052	0,078	0,063	0,134
Dukungan Dana	0,200	0,210	0,305	0,640	0,692
<i>Inconsistency</i>	<i>0,02</i>	<i>0,03</i>	<i>0,06</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>
<i>Kriteria Kondisi Masyarakat</i>					
Agunan	0,194	0,153	0,129	0,124	0,175
Jenis Usaha	0,194	0,153	0,129	0,042	0,175
Pelibatan Masyarakat	0,466	0,576	0,563	0,554	0,559
Sikap Penduduk	0,073	0,059	0,129	0,140	0,046
Persepsi Masyarakat terhadap Program Sejenis	0,073	0,059	0,051	0,140	0,046
<i>Inconsistency</i>	<i>0,01</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,04</i>	<i>0,06</i>

Keterangan Responden :

- A : Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- B : Unsur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- C : Unsur Pengurus BMT Swadaya Pribumi
- D : Unsur Pengawas BMT Swadaya Pribumi (PT. Holcim)
- E : Unsur Kecamatan Klapanunggal

Untuk penilaian terhadap kriteria mana yang merupakan permasalahan utama dalam pemberdayaan masyarakat, tiga responden yaitu Bappeda, Unsur pengurus BMT Swadaya Pribumi dan Unsur kecamatan Klapanunggal memilih Kondisi Masyarakat sebagai permasalahan utama. Bahkan Bappeda dan Unsur pengurus BMT memberikan bobot diatas 70% terhadap pilihannya. Dari hasil wawancara, unsur bappeda menganggap bahwa selama ini pemberdayaan kurang peka dalam mengenali kondisi masyarakat. Artinya program selalu berorientasi pada hasil saja tanpa melihat proses pemberdayaan itu sendiri. Pendapat senada dikemukakan oleh pengurus BMT yang mengatakan bahwa tahap identifikasi

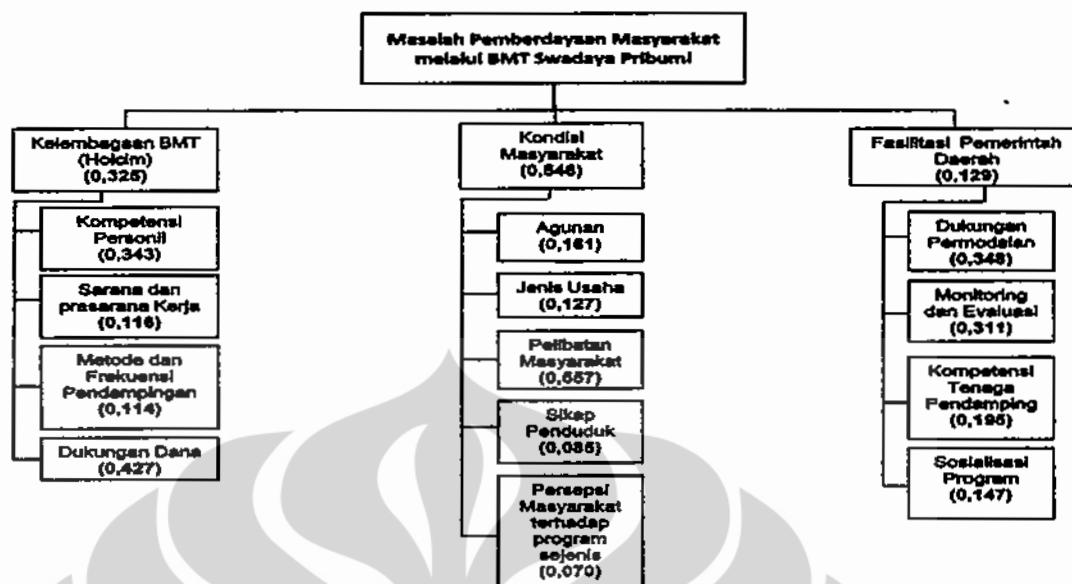
kondisi masyarakat menjadi pintu masuk yang penting bagi proses pemberdayaan di daerah tersebut. Sedangkan dua responden lainnya yaitu BPMPD dan unsur pengawas BMT memilih kelembagaan BMT (Holcim) sebagai permasalahan utama. Sedangkan kriteria fasilitasi pemerintah daerah tidak ada yang memilih. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria ini bukan merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan menurut persepsi mereka.

Terhadap kriteria fasilitasi pemerintah daerah, tiga responden yaitu Bappeda, Unsur pengurus BMT Swadaya Pribumi dan Unsur kecamatan Klapanunggal memilih sub kriteria dukungan permodalan dari pemerintah daerah sebagai permasalahan utama. Sedangkan dua responden lainnya yaitu BPMPD dan unsur pengawas BMT memilih monitoring dan evaluasi sebagai permasalahan utama. Hal yang menarik bahwa unsur BPMPD sebagai mediator pemberdayaan memilih monitoring dan evaluasi sebagai permasalahan utama. Menurut salah seorang staf pada BPMPD, mereka merasa bahwa tahap monitoring dan evaluasi selama ini tidak berjalan baik karena adanya keterbatasan personil dan waktu. Sedangkan sub kriteria kompetensi tenaga pendamping dan sosialisasi program tidak ada yang memilih.

Terhadap kriteria kelembagaan BMT (Holcim), dua responden yaitu Bappeda dan unsur pengurus BMT Swadaya Pribumi memilih sub kriteria kompetensi personil sebagai permasalahan utama. Sedangkan dua responden lainnya yaitu unsur kecamatan dan unsur pengawas BMT memilih dukungan dana sebagai permasalahan utama. Satu orang responden lainnya yaitu BPMPD memilih sarana dan prasarana kerja sebagai masalah utama. Sedangkan sub kriteria metode dan frekuensi pendampingan tidak ada yang memilih.

Terhadap kriteria kondisi masyarakat, seluruh responden memilih sub kriteria pelibatan masyarakat sebagai permasalahan utama. Hal yang menarik bahwa seluruh responden "sepakat" sub kriteria ini merupakan masalah pokok dari pemberdayaan masyarakat.

Sebagai gambaran dibawah ini disajikan hasil hirarki lengkap dengan bobot masing-masing yang menunjukkan prioritas penanganan dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi.



Gambar 5.2 Hirarki Hasil Akhir AHP

5.3 Deskripsi Indikator Pelaksanaan Community Relations

5.3.1 Dimensi Variabel untuk Akuntabilitas dan Transparansi

Pada bagian ini akan dijelaskan apakah perusahaan mempunyai komitmen dan menjalankan semua aturan tentang CSR ini dengan mempertanggungjawabkannya kepada publik, yang terdiri dari 3 indikator yang disusun berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh Business for Social Responsibility (BfSR). Ketiga indikator tersebut adalah :

- a. Ada tidaknya visi dan misi yang menyatakan peduli tentang CSR.

Indikator yang pertama adalah adanya visi dan misi perusahaan yang menyatakan peduli tentang CSR artinya apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan bukti tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan bersungguh-sungguh berkeinginan untuk membina hubungan dengan masyarakat sekitar dengan melaksanakan semua komponen CSR. Hasil wawancara dengan staf comrel, terlihat bahwa dokumen perencanaan tidak terurai dengan jelas bagaimana visi dan misi itu dijabarkan ke dalam strategi-strategi yang lebih teknis.

- b. Indikator yang kedua adalah ada tidaknya kebijakan yang mengatur tentang prosedur penanganan keluhan yang datang dari komunitas lokal dan masyarakat umum. Pada indikator ini penjelasannya adalah bahwa perusahaan menyediakan ruang publik untuk mengkomunikasikan semua keluhan dari masyarakat, baik komunikasi langsung dengan staf dari departemen terkait, misalnya Comrel. Hasil pengamatan dan melihat dokumen tentang penanganan keluhan terbukti memang ada semacam standar penanganan keluhan yang dimiliki oleh perusahaan.
- c. Indikator yang ketiga adalah adanya kebijakan untuk menyediakan semua dialog 2 arah bagi stakeholder, artinya apakah perusahaan membuka diri untuk bisa berdialog dengan stakeholder, baik dengan pemerintah lokal setempat, anggota masyarakat dan LSM. Pertemuan dapat dilakukan secara rutin dan formal, maupun pertemuan-pertemuan informal. Metode penggunaan media komunikasi yang dapat dijadikan alat untuk menjadikan interaksi yang terjalin dapat lebih baik. Dari hasil pengamatan penulis dan mengikuti beberapa pertemuan terlihat bahwa perusahaan sudah menyediakan ruang untuk dialog 2 arah dengan stakeholder (masyarakat sekitar lokasi perusahaan) dengan waktu tertentu dan hasil pertemuan tersebut diimplementasikan dalam kebijakan perusahaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan

5.3.2 Dimensi Variabel untuk Pelibatan Masyarakat

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan apakah perusahaan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik yang berhubungan dengan tambang secara langsung maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat (yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan tambang). Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif (partisipatif) dan programnya dibuat secara berkesinambungan. Program ini sebisa mungkin membuat masyarakat tidak tergantung sepenuhnya pada perusahaan agar pada saat pasca tambang nanti masyarakat menjadi maju dan mandiri, yang terdiri dari 5 indikator, yaitu :

- a. Indikator yang pertama adalah ada tidaknya program yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan perusahaan. Penjelasannya adalah bahwa perusahaan memiliki program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

secara konsisten dan berkelanjutan. Program ini melibatkan masyarakat secara penuh dan dilaksanakan secara partisipatif. Hasil wawancara penulis dengan pengelola program comrel, menunjukkan bahwa PT. Holcim mempunyai dokumen tertulis tentang prosedur pelibatan masyarakat dalam kegiatan perusahaan tetapi hanya memuat garis kebijakan perusahaan mengenai pentingnya hubungan baik dengan masyarakat tanpa rincian yang jelas mengenai strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

- b. Indikator yang kedua adalah adanya sejumlah alokasi dana yang diberikan untuk kegiatan komunitas yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pengelola program, dilihat dari proses penerimaan proposal kegiatan yang didanai oleh perusahaan sampai dengan pencairan dana, alokasi pendanaan tidak didasarkan proporsi dari keuntungan namun relatif memenuhi kebutuhan program dan perusahaan tidak berusaha untuk mencari sumber dana lain.
- c. Indikator yang ketiga adalah rasio keterlibatan komunitas lokal menjadi pekerja di pabrik. Penjelasannya adalah bahwa komunitas lokal dapat dilibatkan dalam kegiatan tambang dengan proporsi yang ideal, untuk menghindari kecemburuan. Hasil wawancara menunjukkan argumentasi bahwa rasio tidak didasarkan pada kebutuhan perusahaan. Perusahaan juga sudah berusaha melakukan pendekatan kepada kontraktor namun hanya berupa himbauan. Faktanya beberapa kontraktor yang bekerjasama dengan PT. Holcim sudah melakukan perekrutan tenaga kerja lokal dengan syarat memenuhi kriteria yang ditentukan oleh kontraktor tersebut.
- d. Indikator yang keempat adalah ada tidaknya peningkatan jumlah karyawan dan jumlah omzet pada usaha kecil yang dibina oleh komunitas. Pada indikator ini penjelasannya adalah perusahaan menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang hasilnya dapat terlihat dari peningkatan jumlah karyawan yang dibina dari usaha kecil tersebut. Hasil pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa usaha ekonomi produktif ini mulai dirasakan oleh masyarakat dengan mulai ada penambahan omzet namun belum diimbangi dengan jumlah karyawan karena masih berkembang.

- e. Indikator yang kelima adalah bagaimana bentuk pendampingan dilakukan oleh perusahaan yang difasilitasi oleh LSM/konsultan. Pada indikator ini penjelasannya adalah bahwa program pendampingan kepada masyarakat tersebut idealnya melibatkan LSM lokal sebagai tenaga pendamping. Pengamatan dan hasil wawancara penulis di lokasi penelitian tidak terdapat LSM lokal dan untuk menyewa konsultan sebagai pendamping masyarakat belum ada pemikiran ke arah itu. Perusahaan lebih memprioritaskan pendampingan ini pada bagian comrel perusahaan sendiri. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pendekatan kepada LSM dan konsultan, namun karena berbagai kendala sampai saat ini belum dilakukan kerja sama tersebut sehingga pendampingannya masih dilakukan oleh SDM Comrel sendiri bekerja sama dengan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer *Community Relations*, diperoleh keterangan bahwa sejak awal perumusan kebijakan tentang CSR/ComRel yang tertuang dalam uraian Misi *Community Relations*, PT. Holcim telah berkomitmen melaksanakan CSR dengan penuh tanggung jawab. Hal ini secara lengkap disebutkan bahwa :

1. PT. Holcim Indonesia Tbk, berkomitmen pada pelaksanaan Pembangunan yang Berkelanjutan
2. Adanya kebijakan Tanggungjawab Sosial, dimana sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, disadari pentingnya pelaksanaan CSR dan bertujuan untuk menjadi yang terdepan.

Dukungan pimpinan perusahaan berkaitan dengan penyediaan dana juga dapat terlihat dari pernyataan manajer ComRel bahwa “Jika mengacu pada pasal 74 ayat (2) dimana intinya disebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan serta pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Jika memperhatikan kata kewajaran dan kepatutan ini sebenarnya PT. Holcim berhak tidak mengeluarkan dana untuk CSR pada tahun 2004 dan 2005 dimana perusahaan mengalami kerugian, tetapi ternyata perusahaan tetap berkomitmen

mengeluarkan dana untuk CSR sebesar masing-masing Rp. 2,2 M dan Rp. 1,7 M. Hasil wawancara dengan manajer Comrel, beliau menuturkan bahwa selama ini Holcim terus berupaya menjalankan komitmen untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini dijalankan terus walaupun pada saat perusahaan mengalami kerugian dalam usaha.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, perusahaan memprioritaskan adanya dialog. Pertemuan Forum Konsultasi Masyarakat, menjadi wadah bertemunya warga dan pemangku kepentingan, pihak berwenang (kecamatan, kepolisian, unsur urusan agama), wartawan dan pengelola program. Pertemuan ini diadakan secara teratur 2 kali setahun dan terbuka untuk membahas dan memecahkan persoalan warga, kemajuan proyek, mempererat hubungan antar warga dan mencari masukan tentang program pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Namun “Tidak ada gading yang tak retak”, ungkapan ini tepat ditujukan pada program ComRel PT. Holcim. Walaupun sudah berkontribusi banyak terhadap pembangunan di Kecamatan Klapanunggal, hasil wawancara dengan responden memperlihatkan masih ada warga yang merasa tidak puas dengan keberadaan PT. Holcim di daerah mereka. Berikut ini adalah beberapa alasan yang disampaikan responden yang menjawab “tidak bermanfaat” terhadap pertanyaan “apakah keberadaan PT. Holcim bermanfaat bagi masyarakat?”. Pada umumnya responden yang menjawab tidak bermanfaat ini yaitu para penerima bantuan kredit melalui BMT Swadaya Pribumi. Dari hasil wawancara diketahui bahwa walaupun mereka mendapat bantuan dari PT. Holcim melalui BMT Swadaya Pribumi tetapi mereka tidak bisa menutup mata begitu saja dengan kondisi masyarakat di desa. Beberapa hal yang menjadi alasan kurangnya manfaat PT. Holcim antara lain :

1. Masih banyaknya pengangguran di lingkungan sekitar PT. Holcim sehingga masih ada kerawanan dan kriminal
2. Dampak operasional perusahaan menyebabkan lahan pertanian menjadi tidak subur dan hasilnya memburuk akibat pengaruh dari limbah/polusi pabrik
3. Perusahaan sebaiknya sering turun ke lapangan dan melihat langsung perkembangan / pembangunan jalan

4. Perusahaan tidak memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat lokal
5. Perusahaan kurang bekerjasama dengan pemerintah setempat
6. Kegiatan CSR kurang menyentuh perekonomian.

Sedangkan terhadap pertanyaan “Harapan Masyarakat terhadap Keberadaan PT. Holcim”, jawaban responden terdiri dari :

1. Perusahaan diharapkan memberikan modal usaha untuk pedagang kecil dengan bunga yang rendah disertai pendampingan dan pengarahan yang jelas pada masyarakat
2. Untuk beasiswa pendidikan per desa agar lebih banyak
3. Penyediaan lapangan kerja lebih banyak prioritas orang-orang yang berdomisili di kec. Klapanunggal bukan di luar
4. Lebih memperhatikan limbah polusi pabrik terhadap tanah, air dan udara untuk menunjang keberhasilan tani dalam lahan pertanian
5. Diadakannya penyuluhan dan pembinaan (Balai latihan Kerja) dan menjadikan PT. Holcim menjadi Bapak Asuh dalam pengembangan usaha atau peningkatan ekonomi di lingkungan sekitar PT. Holcim
7. Bantuan penyediaan sarana dan prasarana terutama di bidang peribadatan dan pendidikan
8. Modal usaha BMT ditingkatkan dan bagi hasil jangan terlalu tinggi serta jangka waktu pinjaman diperlama (12 - 36) bulan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terkait pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi serta merumuskan alternatif strategi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan *Community Relations* PT. Holcim dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan alat analisis AHP dengan menggunakan lima orang *expert* sebagai responden untuk menggali dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi.

Dari hasil pengolahan tersebut menghasilkan faktor-faktor utama yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BMT Swadaya Pribumi sebagai berikut :

- a. Faktor utama yang menjadi kendala adalah kondisi masyarakat dengan bobot sebesar (0,546). Kendala utama ini paling dipengaruhi oleh pelibatan masyarakat dengan bobot sebesar (0,557). Dari hasil temuan di lapangan terlihat bahwa permasalahan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya interaksi petugas BMT sebagai pendamping dengan masyarakat. Masyarakat diperlakukan sama seperti nasabah biasa umumnya. Hal ini dikarenakan peran BMT sendiri lebih cenderung sebagai lembaga keuangan biasa yang tujuan utamanya menyalurkan dana saja sehingga agak mengabaikan peran pemberdayaannya. Pemerintah sebagai fasilitator mestinya harus mengawasi dan mendampingi saat BMT menyalurkan kreditnya pada masyarakat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga tujuan pemberdayaannya dapat tercapai.
- b. Selain faktor utama di atas, hasil pengolahan juga menunjukkan bahwa dalam kriteria kelembagaan BMT (Holcim) terdapat kendala dalam hal dukungan dana dengan bobot sebesar (0,427). Dari penjelasan pengurus BMT ternyata jika dilihat dari jumlah penduduk yang harus dilayani, jumlah aset sebesar Rp. 2,5 Milyar pun belum mampu menjangkau penduduk miskin

Klapanunggal yang ingin berusaha. Misalnya jika BMT ingin memberikan dana sebesar Rp. 500 ribu, maka penduduk miskin yang dapat dilayani hanya sebesar 5000 orang atau hanya 20% saja.

- c. Faktor lainnya yang muncul adalah terkait fasilitasi pemerintah daerah, yaitu kendala dukungan permodalan dengan bobot sebesar (0,427). Hasil wawancara dengan unsur pemerintah daerah menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi masalah dalam memberikan dukungan permodalan bagi masyarakat. Namun pemerintah terus berusaha meningkatkan dana untuk dukungan permodalan ini. Salah satunya melalui program-program baru yang berbasis dari masyarakat.

Berkaitan dengan temuan faktor-faktor yang menjadi kendala proses pemberdayaan yang dilaksanakan BMT di atas, terdapat beberapa usulan berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan. Beberapa perbaikan yang penulis dapat usulkan kepada masing-masing pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. **BMT Swadaya Pribumi**, yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan BMT, baik sebagai nasabah atau sebagai mitra kerja. Sebagai nasabah, pelibatan masyarakat dapat dilakukan dengan membina dan mengajak masyarakat untuk berusaha mandiri melalui usahanya. Sebagai mitra kerja, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan BMT.
2. **PT. Holcim**, yaitu meningkatkan dukungan dana bagi permodalan BMT dengan alasan dana yang ada di BMT sekarang masih kurang dibandingkan penduduk yang harus dilayani.
3. **Pemerintah Kabupaten Bogor**, yaitu meningkatkan dukungan permodalan bagi masyarakat, hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara yang mengatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat yang mau memanfaatkan dana BMT untuk usahanya.

Hasil temuan lapangan lain yang bisa disimpulkan adalah inovasi PT. Holcim dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Inovasi tersebut

berupa strategi penyaluran dana dimana pada saat bantuan keuangan langsung yang diberikan pada masyarakat tingkat pengembaliannya tidak sesuai harapan, perusahaan segera menginisiasi pembentukan lembaga keuangan mikro yang diberi nama BMT Swadaya Pribumi tidak lama setelah program yang pertama tidak berhasil. Terbukti hanya 3 tahun setelah pembentukan lembaga ini pada tahun 2006, asetnya sudah naik sebanyak 703% (dari Rp. 360.443.929.- menjadi Rp. 2.893.779.574.-. Dari pelaksanaan Program CSR lainnya, hal di atas merupakan inovasi karena program pemberdayaan sejenis yang dilakukan oleh PT. Indocement Tunggul Prakarsa (berlokasi di Kecamatan Citeureup dan berdampingan dengan Kecamatan Klapanunggal), penyaluran dananya disalurkan lewat lembaga keuangan bank yaitu bank Mandiri. Proses pengajuan kredit pada bank tersebut harus berhubungan langsung dengan bank seperti layaknya nasabah biasa. Berbeda dengan program di PT. Holcim, dimana mereka membentuk lembaga keuangan mikro syariah (Baitul Maal wat Tamwil/BMT) yang pengurusnya merupakan penduduk yang berdomisili di Klapanunggal. Selanjutnya masyarakat yang ingin mengajukan kredit berhubungan langsung dengan BMT tersebut. Hal ini juga mempunyai maksud agar masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan BMT tersebut.

6.2 Saran dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan khususnya community relations department agar di masa yang akan datang dapat lebih bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan :

1) Alternatif kebijakan yang disarankan penulis berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui BMT, adalah :

a. Bagi BMT Swadaya Pribumi

1) Mengevaluasi kegiatan BMT terhadap indikator keberhasilan yang sudah ditulis dalam dokumen BMT Swadaya Pribumi untuk perbaikan kegiatan BMT di masa datang.

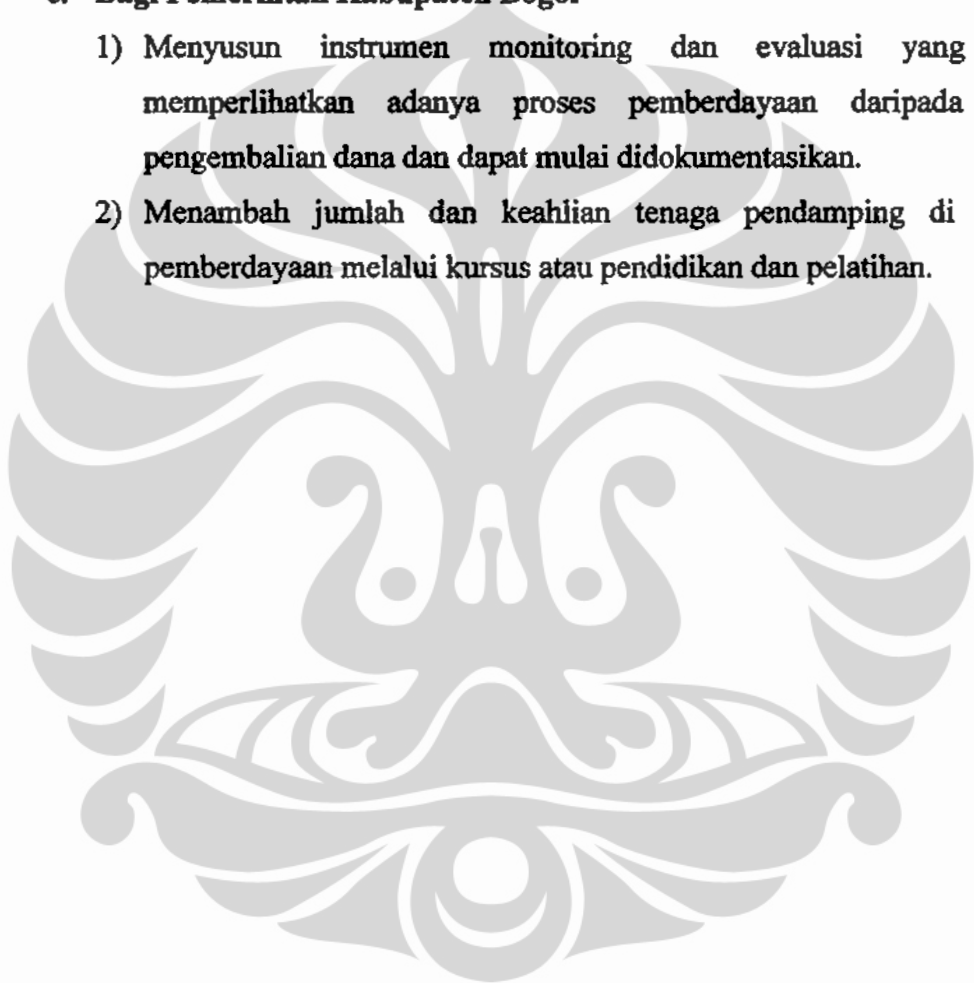
- 2) Meningkatkan kemampuan personil melalui pendidikan dan pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat.

b. Bagi PT. Holcim

Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor

- 1) Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang lebih memperlihatkan adanya proses pemberdayaan daripada unsur pengembalian dana dan dapat mulai didokumentasikan.
- 2) Menambah jumlah dan keahlian tenaga pendamping di bidang pemberdayaan melalui kursus atau pendidikan dan pelatihan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali F. Dan Fauzi A I. 1998. Kontrak Sosial, Dunia Usaha dan Politik Nasional, dalam Majalah Manajemen Usahawan Indonesia. Jakarta : Lembaga Manajemen, FE - UI
- Baron dan P. David. 2006. *Business and It's Environment*. Edisi ke-5. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc.
- Beratha, I. Nyoman. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982
- Bertens K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Bowen HR. 1953. *Social Responcibility of the Businessman*. New York: Harper _____, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, 2005
- Darwin, Ali ; Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di Indonesia, *Economics Business Accounting Review*, Edisi III / September – Desember 2006.
- Dellaportas, S., K. Gibson, R. Alagiah, M. Hutchionson, P. Leung dan D.V. Homrigh. 2005., *Ethics, Governace and Accounting: A Profesional Perspective*. Jhon Wiley & Sons Australia Ltd., Australia
- Ganie-Rochman, Meuthia. Meregulasi Gagasan CSR, artikel internet, diakses tanggal 30 Juli 2009.
- Gibson, Ivansevich, Donnely. 1994, Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung, Humaniora Utama Press,.
- Jalal. 2009, Wacana Hubungan antara Negara dan CSR, Majalah Bisnis & CSR, Edisi Januari-Februari 2009.
- Jahja, R.S, 2004. Efektivitas Corporate Social Responsibility PT. Berau Coal Prima terhadap Peningkatan Community Development. Tesis. Pasca Sarjana FISIP UI.
- Kartasmita, Ginanjar. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo. 1996.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia. 1974.
- Kotler, P dan N.Lee, 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Son, Inc.USA.
- Korten, David C. *Pembangunan yang memihak Rakyat*, Lembaga Studi Pembangunan. Liu Laporan Kegiatan. Jakarta. 1984.
- Liu Franklin Fuh-Hwa, dan Harlin Hui (2004), *The Voting Analytic Hierarchy Process Methods for Selecting Supplier*, International Journal of Productional Economics.
- Moleong, Lexy, J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Rosada Karya. Bandung.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1999.
- Nurdiana, 2008. *Analisis Efektifitas Implementasi Corporate Social Responsibility PT Kaltim Prima Coal, Bogor*. (Tesis). Sekolah Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis IPB Bogor.
- Patton, M.Q., 1987, *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. Sage Publication. London.
- _____, Pemerintah Kabupaten Bogor, 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2008 – 2013*, Bogor.
- _____, Pemerintah Kabupaten Bogor. *Pedoman Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM)*. 2005.
- _____, Pemerintah Kabupaten Bogor. *Petunjuk Teknis Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM)*. 2009.
- Permadi, B. (1992), *Analytical Hierarchy Process*, Pusat Antar Universitas, Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN*, Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Jakarta.

Robert K. Yin. 1989. *Case Study Research. Designs and Methods*. Sage Publication Ins. California. London.

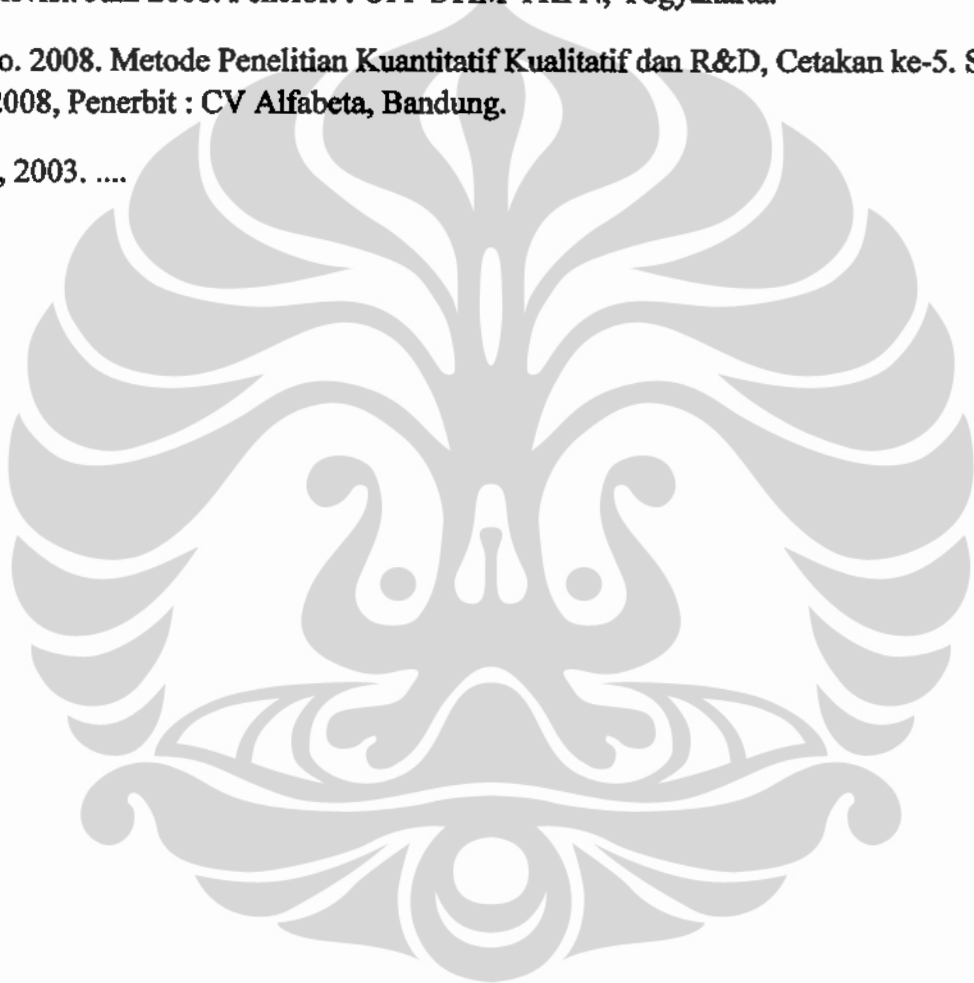
Solihin, Ismail, 2008, *Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Gramedia. Jakarta. 1999.

Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi. Juni 2008. Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-5. September 2008, Penerbit : CV Alfabeta, Bandung.

Welford, 2003.



Lampiran 1

Kuesioner AHP

Nama Responden :

Instansi :

Alamat :

I. TUJUAN:

Kuesioner ini dibuat sebagai bagian dari bahan penulisan thesis tentang Pelaksanaan CSR PT. Holcim Tbk. terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi). Kuisloner ini diharapkan dapat diisi oleh para expert (orang – orang yang memahami masalah – masalah dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor).

Tujuan utama dari hasil pengolahan kuisloner ini adalah untuk mengidentifikasi masalah - masalah yang mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat digunakan untuk menyusun prioritas kebijakan pemberdayaan masyarakat ke depan.

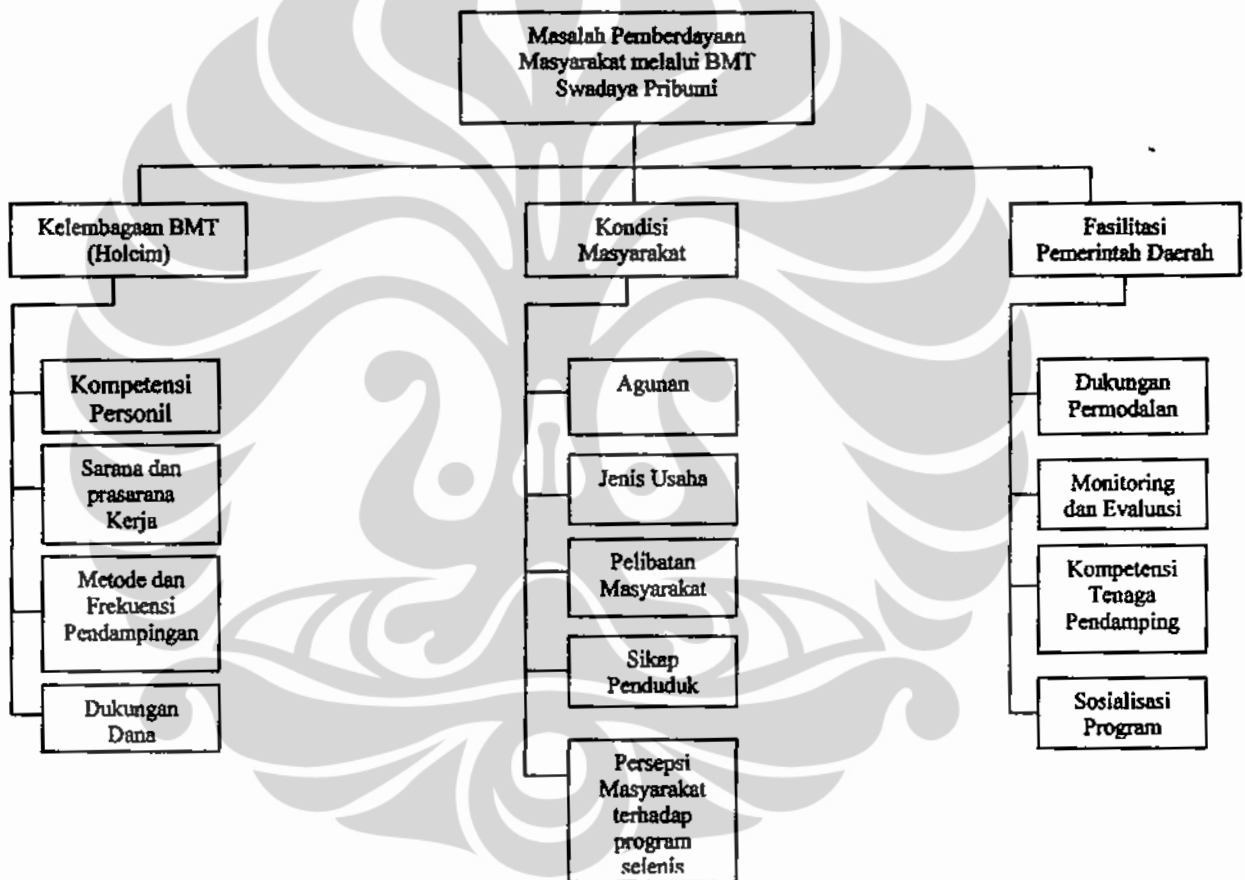
II. PENGERTIAN_AHP

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah Metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok – kelompok, dan mengaturnya kedalam suatu hirarki. Metode AHP dapat digunakan untuk membuat alternatif – alternatif kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah.

Dalam mengisi matriks di bawah, yang perlu dilakukan adalah memperbandingkan pengaruh atau tingkat kepentingan elemen-elemen di setiap level pertanyaan dengan menggunakan nilai skala.

III. PENGISIAN AHP

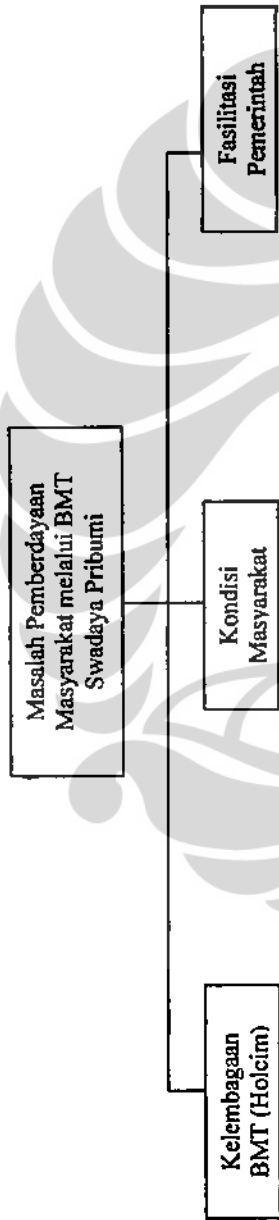
Mohon Bapak/Ibu mencermati struktur hierarki berikut ini mengenai masalah pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Struktur hierarki dalam bagan berikut terdiri dari jenjang tujuan atau *goal* yaitu untuk mengetahui masalah dalam pemberdayaan masyarakat; jenjang kriteria merupakan beberapa pelaku yang mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan jenjang sub kriteria yang merupakan faktor-faktor yang diperkirakan menjadi masalah pada setiap pelaku pemberdayaan masyarakat.



Bapak/Ibu dimohon untuk membandingkan tiap kriteria dengan kriteria lain terkait dengan permasalahan yang menjadi tujuan. Berikut ini adalah sistem skala penilaian dari perbandingan kriteria :

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Lebih penting	A lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala missal 6 antara 5 dan 7
Resiprokal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Asumsi masuk akal

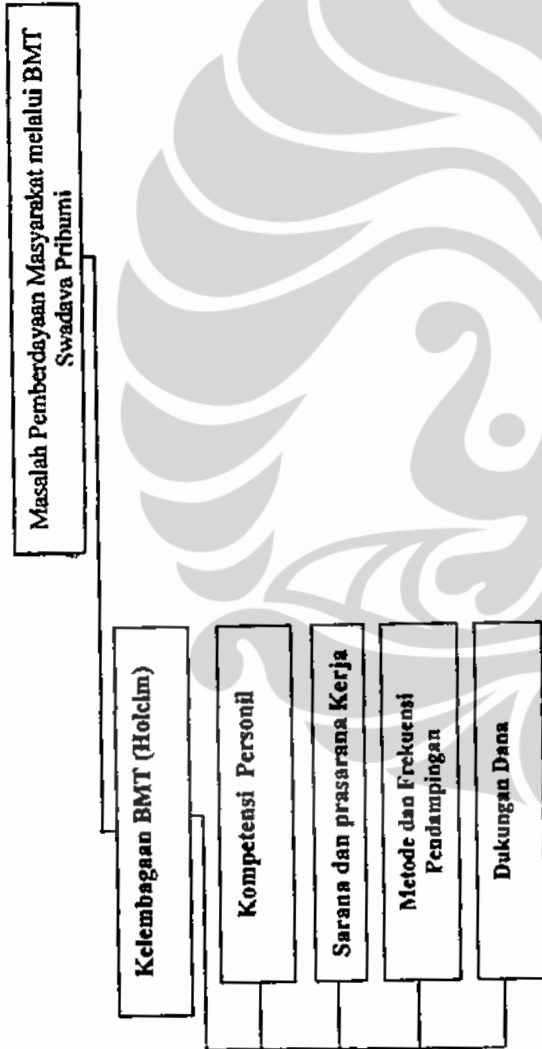
Bapak/Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan berikut dan memberi skala perbandingan dengan tanda silang (X) pada kolom yang disediakan sesuai dengan skor kriteria penilaian.



Pertanyaan 1:

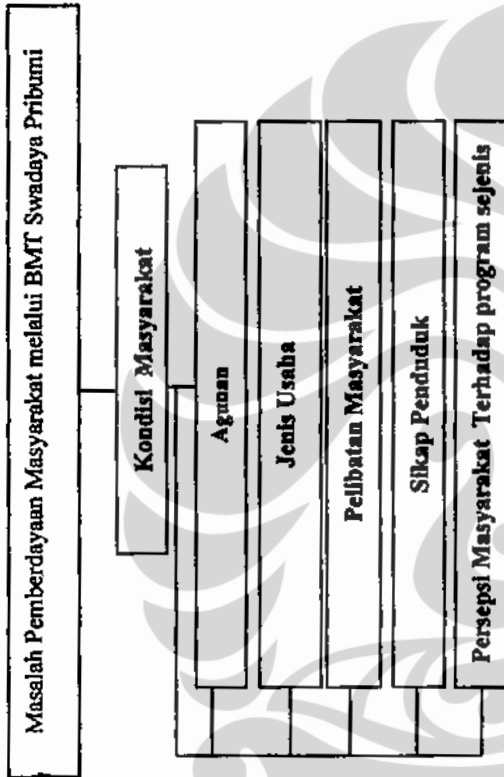
Dari beberapa faktor dibawah ini, manakah menurut Bapak/Ibu yang paling prioritas merupakan masalah dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor?

Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 1
Kelembagaan BMT (Holcim)										Kondisi Masyarakat
Kelembagaan BMT (Holcim)										Fasilitasi Pemerintah Daerah
Kondisi Masyarakat										Fasilitasi Pemerintah Daerah



Pertanyaan 2:
 Menurut Bapak/Ibu faktor manakah yang paling prioritas menjadi masalah Kelembagaan BMT (Holcim) dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor?

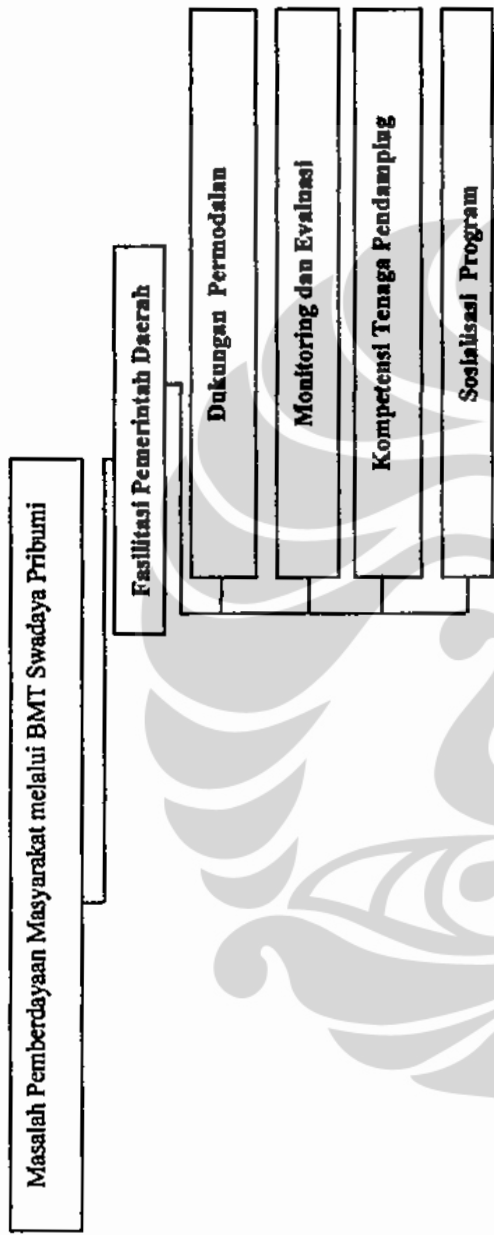
Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 1
Kolom 1										Sarana dan Prasarana Kerja
Kompetensi Personil										Metode dan Frekuensi Pendampingan
Kompetensi Personil										Dukungan Dana
Kompetensi Personil										Metode dan Frekuensi Pendampingan
Sarana dan Prasarana Kerja										Dukungan Dana
Sarana dan Prasarana Kerja										Dukungan Dana
Metode dan Frekuensi Pendampingan										Dukungan Dana



Pertanyaan 3:

Menurut Bapak/Ibu faktor manakah yang paling prioritas menjadi masalah Kondisi Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor?

Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 1
Agunan										Jenis Usaha
Agunan										Pelibatan Masyarakat
Agunan										Sikap Penduduk
Agunan										Pesepsi Masyarakat terhadap program sejenis
Jenis Usaha										Pelibatan Masyarakat
Jenis Usaha										Sikap Penduduk
Jenis Usaha										Pesepsi Masyarakat terhadap program sejenis
Pelibatan Masyarakat										Sikap Penduduk
Pelibatan Masyarakat										Pesepsi Masyarakat terhadap program sejenis
Sikap Penduduk										Pesepsi Masyarakat terhadap program sejenis



Pertanyaan 4:
 Menurut Bapak/Ibu faktor manakah yang paling prioritas menjadi masalah Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui BMT Swadaya Pribumi di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor?

Kolom 1	9	7	5	3	1	3	5	7	9	Kolom 1
Dukungan Permodalan										Monitoring dan Evaluasi
Dukungan Permodalan										Kompetensi Tenaga Pendamping
Dukungan Permodalan										Sosialisasi Program
Monitoring dan Evaluasi										Kompetensi Tenaga Pendamping
Monitoring dan Evaluasi										Sosialisasi Program
Kompetensi Tenaga Pendamping										Sosialisasi Program

Lampiran 2

Bahan Wawancara Expert (AHP)**Untuk Bappeda dan BPMPD**

1. Definisi pemberdayaan menurut bapak?
2. Bagaimana Tolok Ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat?
3. Menurut Bapak / Ibu apa kendala-kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?
4. Kegiatan Monitoring & Evaluasi selama ini seperti apa?
5. Bagaimana tentang kedalaman dan alat (format) yang digunakan?
6. Apa Program pemberdayaan selama ini yang dianggap paling berhasil?
7. Untuk program pemberdayaan masyarakat, siapa yang diundang dalam sosialisasi?
8. Bagaimana kemampuan tenaga pendamping untuk pemberdayaan masyarakat?
9. Apakah diperlukan keahlian khusus / latar belakang pendidikan khusus untuk pemberdayaan?

Untuk BMT Swadaya Pribumi

1. Bagaimana kondisi BMT selama ini?
 - Sarana kerja
 - Lingkungan kerja
 - Kerjasama antar pengurus/ pengurus – pengawas
2. Untuk pendampingan masyarakat, bagaimana prosesnya?
3. Dlm proposal BMT disebutkan indikator keberhasilan. Bagaimana hasil evaluasinya?
4. Apakah diperlukan keahlian khusus untuk pendampingan masyarakat?
5. Bagaimana cara pendampingan dilakukan? Berapa kali?
6. Bagaimana dukungan PT. Holcim selama BMT berdiri? Peran pengawas (Holcim) dalam BMT
7. Bagaimana karakteristik masyarakat di Klapanunggal yang bapak ketahui?
8. Menurut bapak bagaimana sebaiknya pelibatan masyarakat tersebut dalam kegiatan BMT?

Wawancara dengan Pengelola Program Comrel PT. HOLCIM, Tbk

Data Sekunder

1. Company Profile (Visi, misi, tujuan perusahaan yang dikaitkan dengan pengembangan CD (Community Dev)
2. Peraturan atau SOP ttg CSR/CD yang dibuat perusahaan (jika ada)
3. Data ttg pekerja berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, lama kerja, tunjangan yang diberikan, agama, suku dan sebagainya?
4. Kegiatan CD yang pernah dilakukan dan Monitoring & Evaluasi kegiatan yang ada?
5. Jumlah masyarakat yang menerima bantuan dan jumlah dana yang dialokasikan untuk masing-masing item?
6. Kapasitas produksi setiap bulan serta target produksi setiap tahunnya?
7. Laporan keberlanjutan CSR/Comrel secara periodik (tahun 2002 -2008)
8. Laporan Need Assesment dari Konsultan sebelum perusahaan melakukan kegiatan Community Relationship (jika ada)

(Ket : Data perusahaan yang ada di lokasi pabrik Narogong saja)

Pelaksanaan CSR

1. Apakah perusahaan mempunyai aturan tertulis tentang CSR? Dari mana sumber/Inspirasinya?
2. Bagaimana perusahaan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat?
3. Apakah ada laporan tertulis tahunan tentang berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan (baik kegiatan produksi, perbaikan lingkungan dan kegiatan Community Development)
4. Sudah berapa lama perusahaan melaksanakan program CSR? Bagaimana sejarahnya perusahaan bergerak untuk melaksanakan program-program CSR?
5. Apakah perusahaan melakukan need assesment terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan CSR?
6. Berapa dana yang dialokasikan untuk kegiatan CSR setiap tahunnya? Apakah semakin bertambah atau semakin berkurang (kenapa hal itu bisa terjadi)?
7. Atas dasar apa penentuan alokasi dana tersebut? Apakah disesuaikan dengan profit perusahaan atau ada kebijakan lain?

8. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan perusahaan kepada masyarakat? Apakah perusahaan membuat skala prioritas kegiatan CD untuk masyarakat? Atas dasar apa skala prioritas itu dibuat?
9. Apakah perusahaan selalu melakukan monev (monitoring dan evaluasi) terhadap kegiatan yang telah dilakukan, bagaimana hasilnya?
10. Apakah ada divisi khusus yang menangani CD? Berapa orang pekerja? Apakah ada CDO (Community Development Officer) yang menangani lokasi tertentu/spesialisasi per sektor?
11. Jika ada masalah yang dihadapi oleh CDO di lapangan, bagaimana proses penyelesaiannya? Masalah apa saja yang mereka dapat tangani secara langsung?
12. Bagaimana proporsi bantuan yang diberikan (lebih banyak hibah/charity) atau kegiatan-kegiatan ekonomi produktif?
13. Sejauhmana monitoring dari CEO? Apakah ia mendukung atau menghambat jalannya kegiatan?

Keterlibatan Stakeholders

1. Pihak-pihak (stakeholder) mana saja yang terlibat dalam penyelenggaraan CD ini? Apa melibatkan pemerintah, LSM lokal, organisasi, masyarakat setempat?
2. Apakah perusahaan mempunyai kriteria tertentu pada saat melibatkan pihak-pihak tertentu? Jika ada seperti apa kriterianya?
3. Apa bentuk keterlibatan dari masing-masing pihak tersebut? Sejauhmana mereka memberikan tekanan sosial kepada perusahaan untuk menjalankan CSR?
4. Bagaimana pendapat perusahaan tentang usaha pihak-pihak tersebut? (Apakah mengganggu kinerja perusahaan, atau ditanggapi dengan positif)

Keterlibatan Masyarakat (spesifik)

1. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan apa saja? (planning – implementation – monev)
2. Apakah proses pelibatan masyarakat tersebut dengan model partisipatif (tolong jelaskan prosesnya)
3. Bagaimana respon mereka dalam kegiatan tersebut, apakah antusias melakukannya atau biasa-biasa saja, atau tidak bersemangat? Mengapa demikian?
4. Apakah ada perbaikan taraf kehidupan setelah mereka diberikan bantuan oleh perusahaan? Jika ya bagaimana perusahaan mengetahuinya?

5. Apakah masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan primer perusahaan (kegiatan yang berhubungan dengan produksi) jika ya kegiatan apa saja (tolong jelaskan)
6. Apakah masyarakat juga dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan sekunder perusahaan (kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi) jika ya, apa saja bentuk kegiatan-kegiatan tersebut (tolong jelaskan)
7. Sejauh ini menurut anda bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan?
8. Menurut Anda kira-kira perbaikan seperti apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?

Exit Strategy

1. Apakah perusahaan telah membuat berbagai rencana sehubungan dengan Exit Strategy (mengingat kegiatan produksi pabrik termasuk kegiatan tambang yang tidak akan lama)?
2. Bagaimana cara perusahaan menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan? Bagaimana jika kemudian masyarakat bereaksi terhadap pengurangan bantuan yang ada? Apa langkah perusahaan selanjutnya?

Konflik

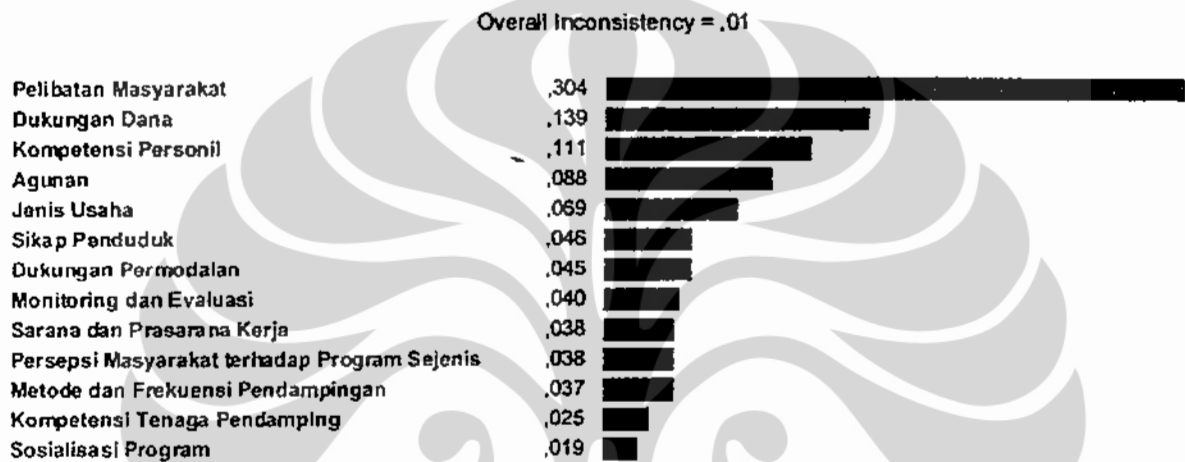
1. Apakah perusahaan pernah berkonflik dengan masyarakat? Jika ya, konflik apa? Kapan saja? Dimana? Berapa lama? (tolong uraikan kronologisnya)
2. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam konflik tersebut?
3. Bagaimana cara perusahaan menyelesaikan masalah itu?

Terima kasih atas jawabannya

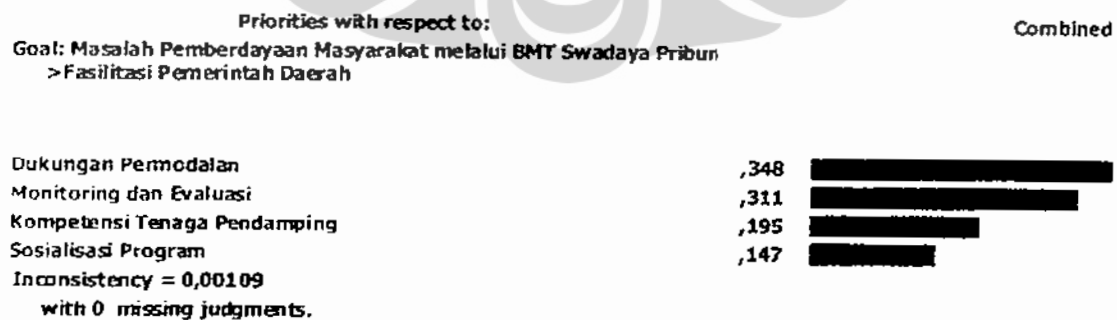
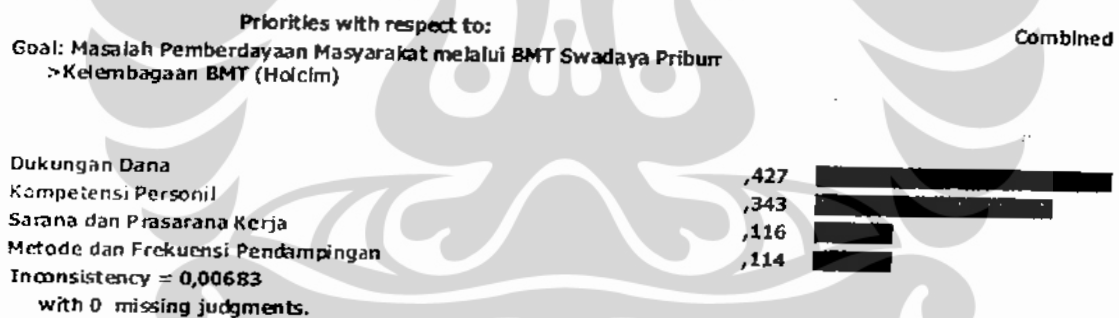
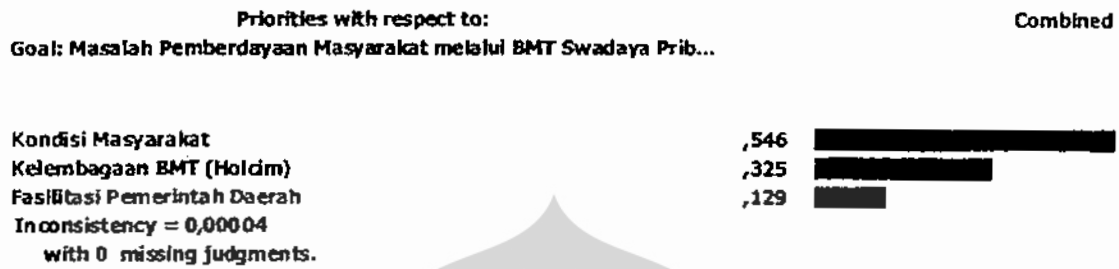
Model Name: AHP-JADI BERDAYA

Synthesis: Summary

Synthesis with respect to: Goal: Masalah Pemberdayaan Masyara...



Model Name: AHP-Jadi Berdaya



**LOW CHART PROSES PEMBIAYAAN
MT SWADAYA PRIBUMI**

